

## DAFTAR ISI

<b>BAB I</b> .....	- 1 -
<b>PENDAHULUAN</b> .....	- 1 -
1.1. Latar Belakang.....	- 1 -
1.2. Landasan Hukum.....	- 2 -
1.3. Maksud dan Tujuan .....	- 5 -
1.4. Sistematika Penulisan.....	- 5 -
<b>BAB II</b> .....	- 6 -
<b>HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2021</b> ..	- 6 -
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan .....	- 7 -
Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	- 7 -
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	- 28 -
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	- 32 -
2.4. Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD .....	- 34 -
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	- 61 -
<b>BAB III</b>	
<b>TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN</b> .....	- 72 -
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	- 72 -
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	- 80 -
3.3. Program dan Kegiatan.....	- 86 -
<b>BAB IV</b>	
Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah .....	- 96 -
<b>BAB V</b> .....	- 127 -
<b>PENUTUP</b> .....	- 127 -
5.1 Kaidah Pelaksanaan Pelaksanaan Rencana Kerja .....	- 127 -
5.2 Rencana tindak lanjut. ....	- 129 -

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 dengan berpedoman pada Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Tahun 2023 merupakan tahun kelima dalam periode Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2023 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2023 sehingga Rencana Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 disusun harus berpedoman pada visi dan misi Kepala Daerah terpilih Tahun 2019-2023 serta arah kebijakan pembangunan tahun keempat sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2023 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2023. Sesuai dengan amanat tersebut dan guna lebih meningkatkan keterpaduan dan keselarasan antar program-program di lingkungan Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan, yaitu Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang berisi program dan kegiatan disertai dengan pendanaan indikatif, untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan dengan tema, prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2023.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan ini, antara lain :

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
6. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur;

15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005 – 2025;
16. Peraturan Daerah No. 4 tahun 2012 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
17. Peraturan Presiden R.I Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden RI No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Terakhir Perubahan dengan peraturan Presiden R.I Nomor 95 Tahun 2007;
18. Peraturan Presiden RI Nomor 28 tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional, sebagai pedoman dalam pengembangan industri nasional dan sebagai dasar pemberian fasilitas pemerintah;
19. Peraturan Presiden RI No. 28 tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Menteri Perindustrian No.13/MIND/PER/1/2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian No.111/MIND/PER/ 10/2009 Tentang Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Klaster Industri Hilir Kelapa Sawit;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 Penganti Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

25. Peraturan Daerah No 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 (Lembaran 4 Pasal 1 Butir 10 );
27. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 45 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur; kemudian Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 71 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
28. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 42 tahun 2020 tentang Pembentukan dan susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Timur.
29. Surat Edaran Gubernur Nomor: 050/0213/B.P3D-Bapp/2021 tentang Sinkronisasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023.
30. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur nomor 050/6972/B.PPEPD-Bapp/2021 tanggal 16 Desember 2021 perihal Penyusunan Rancangan Akhir RKPD dan RENJA Perangkat Daerah Tahun 2023

31. Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 050/0021/B.PPED-Bapp/2022 tentang Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur dan Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan rencana kerja tahun 2023 dimaksudkan untuk merumuskan program dan kegiatan tahunan didasarkan pada rencana yang telah disusun, capaian pelaksanaan dan perubahan lingkungan strategis, terutama dalam pencapaian visi pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Timur di sektor Industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja ini sebagai berikut :

- a) Mengidentifikasi permasalahan-permasalahan dan capaian pembangunan bidang Industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur.
- b) Mensinergikan rencana pembangunan bidang industri, perdagangan, koperasi dan UKM pada level nasional, provinsi dan Kabupaten/Kota.
- c) Merumuskan rencana program/kegiatan tahun 2023 beserta pendanaannya dalam upaya pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan.
- d) Sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kegiatan Anggaran SKPD (RKA SKPD) maupun Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA SKPD) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kaltim.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Penyajian rencana kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu:

Bab I : Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2021

2.1. Evaluasi Triwulan Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2021

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.4. Review terhadap Rancangan Akhir RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program Kegiatan Masyarakat

Bab III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kebijakan

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.3. Program dan Kegiatan

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V : Penutup

5.1. Kaidah Pelaksanaan Rencana Kerja

5.2. Rencana Tindaklanjut

**BAB II**  
**HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD**  
**TAHUN 2021**

## **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Penyusunan Renja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renja diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian

Renstra Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah .

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi.

Untuk penyusunan Renja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2021 dan disajikan perkiraan pencapaian target Renstra sampai dengan tahun 2021. Pada tahun 2021 Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan sebanyak 16 (enam belas ) program dengan rencana anggaran sebagaimana tertuang di dalam APBD sejumlah Rp. 55,799,575,736 (Lima Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam rupiah). Dalam pelaksanaannya program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya dengan realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2021 Rp. 45.805.402.760 (Empat Puluh Lima Milyar Delapan Ratus Lima Juta Empat Ratus Dua ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Rupiah ) atau sebesar 82,09 %.



2.1.1. Realisasi Program dan Kegiatan tahun 2021 yang tidak memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan.

Tidak ada Program dan kegiatan tahun 2021 yang tidak memenuhi target kinerja, semua memenuhi target, hanya untuk realisasi keuangan pada Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri di Kegiatan Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi sebesar 29,37%, karena pelaksanaan pada Triwulan I sampai dengan Triwulan II terjadi pembatasan Kegiatan karena Pandemi Covid-19 melonjak tinggi, dan baru pelaksanaan kegiatan dengan atur jadwal ulang pada akhir triwulan III.

2.1.2. Realisasi Program dan Kegiatan tahun 2021 yang telah memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan.

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan kualitas kinerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur. Indikator Kinerjanya Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM dengan target program sebesar 88 % dengan realisasi fisik sebesar 87.024 % Program ini terdiri atas 7 (tujuh) Kegiatan yang berfungsi untuk mendukung pelayanan internal Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan bersifat rutin meliputi pelayanan urusan umum, keuangan dan pelayanan. Alokasi anggaran untuk melaksanakan 7 (tujuh) kegiatan ini sebesar Rp. 36.734.778.108, terealisasi

sebesar Rp. 31.799.481.677 (87,57 %). Anggaran yang tersedia untuk kebutuhan tersebut dialokasikan melalui 7 (Tujuh ) kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dicapai dengan indikator output Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan Capaian Indikator Kinerja sebesar 70,06 % dengan anggaran sebesar Rp. 1.400.000.000 terserap sebesar Rp. 1.196.780.066 atau sebesar 85,48 %.
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dicapai dengan indikator output Persentase Laporan yang disusun sesuai ketentuan dengan capaian indikator sebesar 94% dengan anggaran sebesar Rp 23.247.941.822 terserap sebesar Rp 19.992.890.148 atau sebesar 86,00%.
- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dicapai dengan indikator output Jumlah PNS Yang Mengikuti Pelatihan/Bimtek 30 orang dengan anggaran sebesar Rp 1.055.782.000 terserap sebesar Rp 991.103.720 atau sebesar 93,87%.
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dicapai dengan indikator output 12 (Dua Belas ) Bulan Administrasi Umum Perangkat daerah dengan anggaran sebesar Rp 4.117.069.383 terserap sebesar Rp 3.962.719.260 atau sebesar 96,25 %.
- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dicapai dengan indikator output 25 unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Disperindagkop dengan anggaran sebesar Rp 2.626.620.000 terserap sebesar Rp 1.911.873.725 atau sebesar 72,79%.
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dicapai dengan indikator output 12 (Dua Belas) bulan Penyediaan Jasa Penunjang

Urusan Disperindagkop dengan sebesar Rp 2.242.055.755 terserap sebesar Rp 1.905.535.959 atau sebesar 84,99%.

- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dicapai dengan indikator output 12 (Dua Belas) bulan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Disperindagkop dengan sebesar Rp 2.045.309.148 terserap sebesar Rp 1.838.578.799 atau sebesar 89.89%.

## 2) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting

Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting dalam rangka tugas dan fungsi bidang Perdagangan dalam Koordinasi Distribusi Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok, Operasi Pasar Barang Kebutuhan Pokok. Target Indikatornya adalah Persentase Ketersediaan Bapokting sebesar Realisasi Kinerja Program sebesar 100%. Program ini dilaksanakan melalui 1 (satu ) kegiatan yaitu Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi. Alokasi anggaran untuk melaksanakan 1 (satu) kegiatan ini sebesar Rp. 1.000.000.000 dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 804.479.650(80,45%). Anggaran yang tersedia untuk kebutuhan tersebut dialokasikan melalui 2 (dua) kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi dicapai dengan indikator output 12 (Dua Belas) Laporan Ketersediaan Bapokting.

2.1.3. Realisasi Program dan Kegiatan yang tahun 2021 yang melebihi target kinerja keluaran dan yang direncanakan.

1). Program Pengembangan Ekspor

Program ini mendukung tugas dan fungsi Program mendukung tugas dan fungsi bidang Perdagangan dalam Sosialisasi Pengembangan Pasar Ekspor, Monitoring Ekspor langsung, Koordinasi Pengembangan dan Peningkatan Ekspor Daerah, Program ini dilaksanakan melalui 1 (satu ) kegiatan yaitu: Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi dengan indikator Persentase pertumbuhan nilai ekspor non migas dan non batubara sebesar 10.94 % dengan target 5% yang melebihi target kinerja keluaran. Alokasi anggaran untuk melaksanakan 1 (Satu ) kegiatan ini sebesar Rp. 1.000.000.000 dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 682.531.738 (68.52 %).

- Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi dengan Indikator Jumlah Calon Eksportir dan Eksportir yang Mendapatkan Akses Pasar Ekspor capaian 3 orang dengan target 2 orang yang melebihi Target.

2) Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen

Mendukung tugas dan fungsi Bidang Perlindungan Konsumen dan pengawasan barang beredar dengan indikator Barang Beredar SNI wajib Yang Diawasi capaian 21.05% melebihi target 15 % dengan anggaran Rp2.750.000.000 dengan realisasi sebesar Rp 1.910.309.873 atau 69.47%, dengan melaksanakan 2(dua) Kegiatan sebagai berikut :

- Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Konsumen yang telah diberikan edukasi dengan capaian 220 orang/opd melebihi target 110 orang/opd
- Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah Barang dan Jasa yang sesuai Ketentuan dengan capaian 64 barang dan jasa melebihi target 21 barang dan jasa.

3) Program Pengendalian Izin Usaha Industri

Mendukung tugas dan fungsi Bidang Industri dengan indikator Persentase pengendalian izin usaha sektor industri terhadap jumlah industri yang terdata capaian 4,5 % target 5% dengan anggaran Rp 3.000.000.000 dengan realisasi sebesar Rp 2.125.162.598 atau 70,84% dengan melaksanakan 1 (satu) Kegiatan sebagai berikut :

- Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi dengan indikator Jumlah industri yang dilakukan pemantauan dan pengawasan dalam penerbitan perizinan capaian 13 industri sesuai target 13 industri.

4) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri

Nasional Mendukung Tugas dan fungsi Bidang Industri dengan indikator Pembinaan industri daerah yang dapat dipantau perkembangannya capaian 10 Industri dengan target 10 industri , Anggaran sebesar Rp 600.000.000 dengan realisasi sebesar Rp 279.319.098 atau 46,55% dengan melaksanakan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut :

- Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) dengan indikator jumlah industri yang memiliki IUI, IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan provinsi capaian 3 industri

2.1.4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program dan kegiatan tahun 2021

Faktor penyebab tidak tercapai target sampai dengan akhir Tahun 2021 karena adanya sisa lelang pengadaan dan efisiensi anggaran dari beberapa rekening belanja kegiatan dan keterbatasan kemampuan pendanaan daerah karena dampak dari covid 19 menyebabkan dukungan anggaran untuk mencapai target kinerja kurang maksimal.

2.1.5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian Program Renstra Perangkat Daerah.

2.1.6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Kebijakan maupun tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah fokus pada target capaian kinerja yang telah dibuat dan jadwal yang telah ditentukan serta mencari terobosan dana tidak hanya mengandalkan APBD saja.

Gambaran secara lengkap atas capaian Renja Tahun 2021 sebagaimana tertuang dalam tabel 2.1.

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d 2022 Provinsi Kalimantan Timur

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2023 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Daerah Tahun 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021*	Tingkat Realisasi (%)		Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10) =(5+7+9)	(11) =(10/4)
3.31.3.30.2.17.01.00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan UPTD									
3.31.3.30.2.17.01.00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.									
SEKRETARIAT										
2.17.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	90	-	88 %	82 %	93	89	171	190
2.17.001.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	79	-	77 Persen	70,06 Persen	91	78	148	187
2.17.001.1.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kegiatan Forum Perangkat Daerah Sektor Industri, Perdagangan Koperasi dan UKM se Kaltim	1	-	1 Laporan	1 Laporan	100	1	2	200
		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	6	-	6 Dokumen	6 Dokumen	100	6	12	200
2.17.001.1.01.002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah laporan Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD	3	-	3 Laporan	3 Laporan	100	0	3	100
2.17.001.1.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja	4	-	4 Laporan	4 Laporan	100	4	8	200
2.17.001.1.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja	4	-	4 Dokumen	4 Dokumen	100	4	8	200
2.17.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan yang disusun sesuai ketentuan	100	-	100 persen	368 Persen	368	100	468	468
2.17.001.1.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Daftar Gaji dan Tunjangan ASN (Dokumen)	1	-	26 Dokumen	26 Dokumen	100	12	38	3.800
2.17.001.1.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	300	-	300 kegiatan	300 kegiatan	100	300	600	200

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2023 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Daerah Tahun 2022			
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021*	Tingkat Realisasi (%)		Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
		Peningkatan Manajemen Pengelola Keuangan	12	-	12	bulan	12	Bulan	100	12	24	200
2.17.001.1.02.006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) yang ditanggapi (laporan)	3	-	4	Laporan	4	Laporan	100	4	8	267
2.17.001.1.02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan dan semesteran	2	-	14	Laporan	14	Laporan	100	14	28	1.400
2.17.001.1.02.008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan estimasi realisasi anggaran	2	-	12	bulan	12	Bulan	100	12	24	1.200
2.17.001.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah PNS Yang Mengikuti Pelatihan/Bimtek	60	-	60	orang	60	Orang	100	30	90	150
2.17.001.1.05.001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek	5	-	20	orang	20	Orang	100	20	40	800
2.17.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Administrasi Umum Perangkat daerah	12	-	12	bulan	12	Bulan	100	12	24	200
2.17.001.1.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor dan Perlengkapannya	100	-	107	unit	107	Unit	100	107	214	214
2.17.001.1.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah makan minum kegiatan dan snack setahun	8000	-	7800	Kotak /porsi	6.395	Kotak /porsi	82	7.800	14.195	177
		jumlah makan minum rapat dan snack setahun		-	4207	Kotak /porsi	4.200	Kotak /porsi	100	4.207	8.407	tidak ada tahun 2022
		jumlah non PNS tenaga Teknis dan Pengelola Administrasi	93	-	47	orang	47	Orang	100	93	140	151
		jumlah Tenaga Pengamanan Aset dan Kantor	24	-	14	orang	14	Orang	100	24	38	158
2.17.001.1.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang yang dicetak (Jenis)	30	-	30	jenis	40	Jenis	133	30	70	233
2.17.001.1.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang diadakan	1300	-	1224	eksemplar	1.220	eksemplar	100	1.224	2.444	188
2.17.001.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Disperindagkop	25	-	25	unit	25	Unit	100	25	50	200



Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2023 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Daerah Tahun 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021*	Tingkat Realisasi (%)		Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.17.001.1.07.006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan perbaikan kantor	50	-	60 unit	60 Unit	100	1	61	122
2.17.001.1.07.009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DED Pembangunan Gedung Galeri UMKM Prov Kaltim	1	-	1 Dokumen	1,00 Dok	100	0	1	100
		Pembangunan Gedung Galeri UMKM Prov Kaltim	1	-				1	1	100
2.17.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Disperindagkop	12	-	12 bulan	12 Bulan	100	12	24	200
2.17.001.1.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai setahun	1500	-	1500 materai	1.500,00 materai	100	1.500	3.000	200
2.17.001.1.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan Belanja Listrik, Air, telepon dan Internet terbayarkan	12	-				12	12	100
		Jasa komunikasi yang terbayarkan	200	-	200 Mbps	184,00 Mbps	92	200	384	192
		Jasa Listrik yang terbayarkan	5600000	-	5600000 Kwh	4.679.795 Kwh	84	5600000	10.279.795	184
		Jasa Sumber Daya Air yang Terbayarkan	8809	-	8809 M3	6.606,72 M3	75	8809	15.416	175
2.17.001.1.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Kebersihan Kantor Luas gedung kantor yang dipelihara kebersihannya (m2)	145000	-	145000 m2	132.916 m2	92	145.000	277.916	192
		Jumlah jenis Alat Tulis Kantor (ATK) yang diadakan (jenis)	70	-	70 jenis	69 Jenis	99	70	139	199
		Penyediaan Jasa Pengiriman surat dan paket	12	-	12 unit	10 Unit	83	12	22	183
		Penyediaan Jasa Publikasi setahun	51	-	51 kali/lembar	50 kali/lembar	98	51	101	198
2.17.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah bulan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Disperindagkop	12	-	12 bulan	12 Bulan	100	12	24	200
2.17.001.1.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas dalam Pemeliharaan setahun	35	-	35 unit	35 Unit	100	35	70	200

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2023 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Daerah Tahun 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021*	Tingkat Realisasi (%)		Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.17.001.1.09.005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah pemeliharaan mebel dalam setahun	2	-	30 unit	30 Unit	100	0	30	1.500
2.17.001.1.09.011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Belanja Jasa Pemeliharaan Alat Kantor dan Gedung	200	-	200 unit	185 Unit	93		185	93
		Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Genset	3850	-	3850 lt	3.850 Lt	100		3.850	100
		Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Alat kantor	112	-	112 unit	112 Unit	100		112	100
		Pemeliharaan Pintu Kantor		-	76 unit	0 Unit	0		0	tidak ada tahun 2022
		Pemeliharaan Rutin berkala Gedung Kantor		-	1000 m2	928 m2	93		928	tidak ada tahun 2022
BIDANG KOPERASI DAN UKM										
2.17.004	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Jumlah KSP/USP yang patuh administrasi dan prinsip koperasi sesuai per-UU-an	50	-	50 koperasi	15 koperasi	30	0	15	30
2.17.004.1.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang dinilai kesehatannya	10	-	10 koperasi	15 koperasi	150	0	15	150
2.17.004.1.01.002	Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi	jumlah pengukuran penilaian koperasi dan diklat penilaian koperasi	50	-	50 kegiatan	106 kegiatan	212	0	106	212
2.17.006	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Jumlah Koperasi berkualitas	10	-	10 Koperasi	9 Koperasi	90	10	19	190
2.17.006.1.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang melakukan RAT	25	-	15 koperasi	12 koperasi	80	20	32	128
2.17.006.1.01.002	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Pembinaan	150	-	150 unit	40 Unit	27	0	40	27

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2023 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Daerah Tahun 2022		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021*	Tingkat Realisasi (%)		Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
	Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Peserta Pelatihan (DAK)	0	-	1050 orang	500 Orang	48	0	500	tidak ada tahun 2022	
2.17.007	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase tercapainya target UKM naik kelas	1	-	1 %	1,00 %	100	1	2	200	
2.17.007.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Wira usaha pemula	10	-	10 wirausaha	70 wirauusaha	700	10	80	800	
2.17.007.1.01.001	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	JumlahUKM yang difasilitasi Produksi, pembiayaan dan Pemasaran	150	-	150 unit	178 Unit	119	150	328	219	
2.17.008	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase pertumbuhan UKM yang menggunakan platform pasar berbasis digital	3	-	3 %	116,60 %	3.887	3	120	3.987	
2.17.008.1.01	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Jumlah wira usaha mandiri	1	-	1 wirausaha	1 wirauusaha	100	1	2	200	
2.17.008.1.01.001	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	jumlah kegiatan strategis sektor koperasi dan ukm	50	-	50 kegiatan	44 kegiatan	88	60	104	208	
<b>BIDANG PERDAGANGAN</b>											
3.30.004	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Ketersediaan Bapokting	300	-	300 %	300 %	100	300	600	200	
		Disparitas harga antar wilayah	17	-	20 %	11,52 %	58	19	31	180	
3.30.004.1.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	Laporan Ketersediaan Bapokting	12	-	12 bulan	12 Bulan	100	12	24	200	
3.30.004.1.01.001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi yang dilaksanakan	5	-	5 kegiatan	5 kegiatan	100	5	10	200	

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2023 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Daerah Tahun 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021*	Tingkat Realisasi (%)		Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	di Tingkat Distributor dan Sub Distributor									
	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Komoditi Bapokting yang Dipantau	21	-				21	21	100
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang dilakukan pemantauan harga dan stok	10	-				10	10	100
	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pasar murah yang Dilaksanakan		-						0
3.30.005	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase pertumbuhan nilai ekspor non migas dan non batubara	5	-	5 %	137,00 %	2.740	5	142	2.840
3.30.005.1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah Calon Eksportir dan Eksportir yang Mendapatkan Akses Pasar Ekspor	2	-	2 orang	3 Orang	150	2	5	250
3.30.005.1.01.005	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Aparat/Pelaku usaha yang mendapatkan fasilitasi pendampingan/pelatihan/bimtek	4	-	4 orang	4 Orang	100	4	8	200
3.30.005.1.01.005	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Calon Eksportir dan Eksportir yang difasilitasi dalam misi dagang		-				2	2	tidak ada tahun 2021
3.30.007	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Peningkatan Jumlah Produk Dalam Negeri Yang difasilitasi pemasaran	5	-	5 Produk	10 Produk	200	5	15	300
3.30.007.1.02	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi Pemasaran	10	-	10 orang	22 Orang	220	10	32	320

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2023 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Daerah Tahun 2022			
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021*	Tingkat Realisasi (%)		Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
3.30.007.1.02.001	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi Pengembangan Produk	14	-	14	pelaku usaha	14	pelaku usaha	100	14	28	200
<b>BIDANG PKPB</b>												
3.30.006	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Barang Beredar SNI wajib Yang Diawasi	15	-	15	%	21,05	%	140	15	36	240
3.30.006.1.01	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Konsumen yang telah diberikan edukasi	1000	-	100	opd/konsumen	50	opd/konsumen	50	1.000	1.050	105
3.30.006.1.01.001	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumlah Peserta Sosialisasi edukasi	1000	-	100	opd	50	Opd	50	1.000	1.050	105
3.30.006.1.01.003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Jumlah Pengaduan yang diterima	15	-	20	Laporan Pengaduan	8	Laporan Pengaduan	40	15	23	153
3.30.006.1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Barang dan Jasa yang sesuai Ketentuan	27	-	21	Barang dan Jasa	23	Barang dan Jasa	110	24	47	174
3.30.006.1.03.001	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah pelaku usaha yang diawasi	100	-	150	pelaku Usaha	113	pelaku Usaha	75	100	213	213
<b>BIDANG INDUSTRI</b>												
3.31.002	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara di kawasan peruntukan industri	2	-	2	Industri	2	Industri	100	2	4	200
3.31.002.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah pelaksanaan rencana pembangunan industri provinsi	5	-	5	Dokumen	5	Dokumen	100	0	5	100
3.31.002.1.01.002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah penyusunan kebijakan	3	-	3	Dokumen	3,00	Dokumen	100	3	6	200

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja Renstra Renstra PD Tahun 2023 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Daerah Tahun 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021*	Tingkat Realisasi (%)		Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3.31.003	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase pengendalian izin usaha sektor industri terhadap jumlah industri yang terdata.	5	-	5 %	4,50 %	90	5	5	190
3.31.003.1.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Jumlah industri yang dilakukan pemantauan dan pengawasan dalam penerbitan perizinan	22	-	13 industri	13 industri	100	17	30	136
3.31.003.1.01.001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah industri yg difasilitasi dalam pemenuhan komitmen perizinan.	7	-	3 Industri	3 Industri	100	5	8	114
3.31.03.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan Di Bidang Industri dalam Lingkup perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Provinsi	7	0	0 dokumen	0 dokumen	0	7	7	100
3.31.004	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Pembinaan industri daerah yang dapat dipantau perkembangannya	10	-	10 Industri	10 Industri	100	15	25	250
3.31.004.1.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	jumlah industri yang memiliki IUI, IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan provinsi	10	-	10 industri	3 industri	30	15	18	180
3.31.004.1.01.002	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	Jumlah Dokumen Data Informasi Industri yang disebarluaskan / dipublikasikan	1	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1	2	200
3.31.3.30.2.17.01.0002	UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang									

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2023 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Daerah Tahun 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021*	Tingkat Realisasi (%)		Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.17.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	90	-	88 %	83 %	94	90	173	192
2.17.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan yang disusun sesuai ketentuan	100	-	100 %	100 %	100	100	200	200
2.17.001.1.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	10	-	10 kegiatan	14 kegiatan	140	10	24	240
		jumlah tenaga non ASN dan pengamanan aset	2	-	24 orang	24 Orang	100	2	26	1.300
2.17.001.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah PNS Yang Mengikuti Pelatihan/Bimtek	20	-	20 orang	25 Orang	125	10	35	175
2.17.001.1.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek	10	-	20 orang	25 Orang	125	10	35	350
2.17.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12	-	12 bulan	12 Bulan	100	12	24	200
2.17.001.1.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100	-	100 unit	222 Unit	222	208	430	430
2.17.001.1.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	25	-	46 unit	32 Unit	70	8	40	160
2.17.001.1.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	10	-	10 kegiatan	20 kegiatan	200	12	32	320
2.17.001.1.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan	100	-	100 Dokumen	20 Dokumen	20	16.390	16.410	16.410
		jumlah barang cetakan dan penggandaan	30000	-	30000 lembar	14.000 lembar	47	0	14.000	47
2.17.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Disperindagkop	12	-	12 bulan	12 Bulan	100	12	24	200
2.17.001.1.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai dalam setahun	500	-	500 lembar	500 lembar	100	544	1.044	209

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2023 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Daerah Tahun 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021*	Tingkat Realisasi (%)		Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Tersedianya jasa pengiriman alat dalam setahun	4	-	4 alat	2 Alat	50	0	2	50
		Tersedianya jasa pengiriman dokumen dalam setahun	24	-	24 Dokumen	3 Doku men	13	0	3	13
2.17.001.1.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	-	12 bulan	12 Bulan	100	12	24	200
2.17.001.1.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor	50	-	63 alat	63 Alat	100	66	129	258
		Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	12	-	12 bulan	12 Bulan	100	12	24	200
2.17.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah bulan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Disperindagkop	12	-	12 bulan	12 Bulan	100	12	24	200
2.17.001.1.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	1	-	1 unit	1 Unit	100	1	2	200
		Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Jabatan	1	-	1 unit	1 Unit	100	1	2	200
2.17.001.1.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pajak Kendaraan Dinas Operasional	2	-	2 unit	2 Unit	100	2	4	200
		Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	2	-	2 unit	2 Unit	100	2	4	200
2.17.001.1.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan genset	1	-	1 unit	1 Unit	100	1	2	200
		Jumlah Pemeliharaan Komputer	5	-	5 unit	5 Unit	100	14	19	380
		Jumlah Pemeliharaan / Reparasi Alat Laboratorium	1	-	1 alat	1 Alat	100	1	2	200
2.17.001.1.09.011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor	12	-	12 bulan	12 Bulan	100	12	24	200



Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2023 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Daerah Tahun 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021*	Tingkat Realisasi (%)		Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3.30.006	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	persentase pelaksanaan penerapan standarisasi dan perlindungan konsumen	90	-	85 %	104,62 %	123	90	195	216
3.30.006.1.02	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	persentase pelaksanaan pengujian dan sertifikasi mutu produk	90	-	85 %	104,62 %	123	90	195	216
3.30.006.1.02.001	Verifikasi Mutu Produk	jumlah produk yang diverifikasi	2	-	2 produk	2 Produk	100	2	4	200
3.30.006.1.02.002	Pengembangan Layanan Pengujian	jumlah contoh yang di uji	50	-	50 contoh	25 Contoh	50	60	85	170
		Peningkatan,Pelayanan jasa teknis pengujian,kalibrasi dan sertifikasi (Sertifikat)	2212	-	1968 Sertifikat	2.150 Sertifikat	109			
<b>3.31.3.30.2.1 7.01.0003</b>	<b>UPTD Pelatihan Koperasi</b>									
2.17.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	90	-	88 %	88 %	100	89	177	197
2.17.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan yang disusun sesuai ketentuan	100	-	100 %	100 %	100	100	200	200
2.17.001.1.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedia Administrasi Pelaksana Tugas ASN	12	-	12 bulan	12 Bulan	100	12	24	200
2.17.001.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah PNS Yang Mengikuti Pelatihan/Bimtek	5	-	20 orang	20 Orang	100	20	40	800
2.17.001.1.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas	35	-	35 Stel	35 Stel	100	0	35	100
2.17.001.1.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tersedia Pelatihan dan Pendidikan Pegawai	10	-	10 OT	10 OT	100	35	45	450
2.17.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Administrasi Umum Perangkat daerah	12	-	12 bulan	12 Bulan	100	12	24	200
2.17.001.1.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Komponen Instalasi	12	-	12 bulan	12 Bulan	100	12	24	200

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2023 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Daerah Tahun 2022			
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021*	Tingkat Realisasi (%)		Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
		Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
2.17.001.1.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedia Bahan Logistik Kantor	12	-	12	bulan	12	Bulan	100	12	24	200
2.17.001.1.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedia Barang Cetak dan Penggandaan	12	-	12	bulan	12	Bulan	100	12	24	200
2.17.001.1.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedia Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	12	-	12	bulan	12	Bulan	100	12	24	200
2.17.001.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah Pengadaan Barang Milak Daerah Penunjang urusan Disperindagkop	10	-	10	unit	58	Unit	580	30	88	880
2.17.001.1.07.002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedia Kendaraan Dinas		-	12	bulan	12	Bulan	100	12	24	0
2.17.001.1.07.005	Pengadaan Mebel	Tersedia Meubeler	12	-	12	bulan	12	bulan	100	12	24	200
2.17.001.1.07.006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedia Peralatan dan Mesin	12	-	12	bulan	12	bulan	100	12	24	200
2.17.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Disperindagkop	12	-	12	bulan	12	bulan	100	12	24	200
2.17.001.1.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedia Jasa Surat Menyurat	12	-	12	bulan	12	bulan	100	12	24	200
2.17.001.1.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Kebutuhan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	-	12	bulan	12	bulan	100	12	24	200
2.17.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah bulan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Disperindagkop	12	-	12	bulan	12	bulan	100	12	24	200
2.17.001.1.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedia Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas	12	-	12	bulan	12	bulan	100	12	24	200
2.17.001.1.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedia Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas	12	-	12	bulan	12	bulan	100	12	24	200
2.17.001.1.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpelihara Peralatan dan Mesin	12	-	12	bulan	12	bulan	100	12	24	200

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2023 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Daerah Tahun 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021*	Tingkat Realisasi (%)		Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.17.001.1.09.007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terpelihara Aset Tetap		-	12 bulan	12 bulan	100	12	24	0
2.17.005	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Jumlah Koperasi dan UKM yang Terlatih	300	-	300 Koperasi dan UKM	300 Koperasi dan UKM	100	300	600	200
2.17.005.1.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi dan UKM yang Mengikuti pelatihan	300	-	660 KUKM	660 KUKM	100	600	1.260	420
2.17.005.1.01.001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah Koperasi dan UKM Terlatih	300	-	210 OK	210 OK	100	600	810	270

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Mengacu Visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 yaitu “ Berani Untuk Kalimantan Timur Berdaulat”, serta misi Kepala Daerah Tahun 2019-2023 :

1. Berdaulat Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia Dan Berdaya Saing, Terutama Perempuan, Pemuda Dan Penyandang Disabilitas.
2. Berdaulat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Wilayah Dan Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan.
3. Berdaulat Dalam Memenuhi Kebutuhan Infrastruktur Kewilayahan.
4. Berdaulat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berkelanjutan.
5. Berdaulat Dalam Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan Yang Bersih, Profesional Dan Berorientasi Pelayanan Publik.

Dari kelima misi tersebut Dinas Perindustrian dan Perdagangan melaksanakan misi yang ke dua yaitu “Berdaulat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Wilayah Dan Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan.”. Kinerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah ditentukan dengan mempertimbangkan berbagai hal antara lain : Sasaran Daerah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah (PD). Kemudian ditetapkan Sasaran Kinerja Utama yang menyatakan sebuah target yang terukur atas sebuah kondisi atau pencapaian tujuan, fokus, spesifik dan sesuai bidang layanan Perangkat Daerah. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dapat dilihat pada

Capaian indikator pembangunan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Sesuai dengan Rencana Kinerja tahun 2021 implementasinya mencakup pelaksanaan 32 ( tiga puluh dua) kegiatan dalam 16 (enam belas) program yang merupakan bagian dari 4 ( empat )

sasaran selama tahun 2021, maka dapat diuraikan analisa capaian kinerja sebagai berikut :

□ Sasaran I	:	Peningkatan Kontribusi lapangan industri pengolahan non migas dan non batubara
Dengan Indikator	:	Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan non migas dan non batubara terhadap PDRB (%)

Rencana tingkat capaian (target) terhadap indikator sasaran I pada tahun 2021 ini adalah 3.38 %, dan realisasi tingkat capaian sampai dengan Triwulan III hasil pengukuran terhadap indikator tersebut sebesar 0,44%, sehingga persentase pencapaian indikator I sebesar 13.01 % .

□ Sasaran II	:	Peningkatan efisiensi Sistem Distribusi Perdagangan, daya saing Komoditi dan ekspor non migas dan non batubara
Dengan Indikator	:	1. Presentase Ekspor non migas dan non batubara terhadap total ekspor kaltim (%) 2. Disparitas Harga Antar Wilayah (%)

Rencana tingkat capaian (target) terhadap indikator sasaran II (dua) pada tahun 2021 ini adalah untuk indikator Presentase Ekspor non migas dan nonbatubara terhadap total ekspor kaltim ditetapkan targetnya sebesar 17.55 % dan realisasi sampai dengan bulan November 2021 sebesar 20.43 %, sehingga persentase pencapaian indikator sasarannya sebesar 116%.

Sedangkan untuk indikator sasaran disparitas harga antar wilayah ditetapkan targetnya sebesar 18% dan realisasi capaian indikator sasaran sebesar 14 %, sehingga persentase pencapaian

indikator sasarannya sebesar 128 %. Dimana presentasi perbedaan harga antar wilayah kab/kota semakin kecil maka pencapaian semakin baik.

□ Sasaran III	:	Peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen.
Dengan Indikator	:	Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK)

Rencana tingkat capaian (target) terhadap indikator sasaran III (tiga) pada tahun 2021 adalah dengan nilai 54 dan realisasi tingkat capaian dari hasil pengukuran terhadap indikator tersebut diperoleh nilai 52,57 sehingga pencapaian indikator sasarannya sebesar 97,35 persen.

□ Sasaran IV	:	Peningkatan Usaha Ekonomi Koperasi dan UKM
Dengan Indikator	:	1. Nilai Omzet Koperasi 2. Nilai Omzet UKM

Rencana tingkat capaian (target) terhadap indikator sasaran IV (empat) tahun 2021 adalah untuk indikator Nilai Omzet Koperasi sebesar 924 Milyar dan realisasi tingkat capaian dari hasil pengukuran terhadap indikator tersebut diperoleh angka 1.100 Milyar Koperasi sehingga persentase pencapaian sasarannya sebesar 119 persen. Untuk indikator Nilai Omzet sebesar 50 Triliun dan realisasi tingkat capaian dari hasil pengukuran terhadap indikator tersebut sebesar 76,8 Triliun, sehingga persentase pencapaian indikator sasarannya sebesar 153 persen. dapat dilihat tabel di bawah ini :

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur

No	Indikator IKU, IKK	SPM/Standar nasional	IKK	Target Rentra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi Capaian		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2023	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2023	Tahun 2023	
I												
1	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB	-		20%	-	-	-	18.90	-	-	-	Perubahan indikator
2	Nilai Ekspor Non Migas (Milyar Dollar)	-		15.9 m	-	-	-	11.83	-	-	-	
3	Disparitas Harga Antar Wilayah	-		16,40	18,00	18,00	17,00	16.40 %	14%	18	17	
4	Indeks Keberdayaan Konsumen	-		54	57	53	54	51.30	52,27	57	60	Pencapaian tahun
5	Koperasi Unggulan	-		10	-	-	-	43	-	0	0	Perubahan indikator
6	UKM Unggulan	-		35	-	-	-	60	-	0	0	Perubahan indikator
7	Persentase sumbangan Koperasi dan UKM terhadap PDRB	-		12.92	13.00		13.50	4.5	-	0	13.50	
8	Nilai Omzet Koperasi	-		-	0.924	1,06 T	1,1 T	0.846 T	1.1 T	1,06	1,1	Indikator dari tahun 2021
9	Nilai Omzet UKM	-		-	50 T	52 T	54 T	3.5 T	76.8 T	52	54	Indikator dari tahun 2021
10	Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan non migas dan non batubara terhadap PDRB	-		2	3,38	4,17	4,51	-1,43	2,09	4,17%	4,51	Indikator dari tahun 2021
11	Presentase Ekspor non migas dan non batubara terhadap total ekspor kaltim	-		16.71 %	17,55%	18,25%	18,97%	16.71 %	20,03 %	18,25 %	18,97 %	Indikator dari tahun 2021

### **2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan, kajian hasil evaluasi pelaksanaan, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Rencana Strategis, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. Pada tingkat implementasi program pada Bagian di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan sebagai berikut:

- a. Pelayanan Administrasi dan Aparatur
  1. Perlunya peningkatan kinerja dan profesionalitas aparatur
  2. Masih kurangnya sumber Daya Manusia PNS
- b. Urusan Wajib Koperasi dan UKM
  1. Tingginya jumlah koperasi tidak aktif, yang mengakibatkan pembubaran koperasi, disinyalir koperasi yang ada terbagi atas koperasi aktif non produktif, koperasi tidak aktif namun produktif dan koperasi tidak aktif dan tidak produktif.
  2. Kurangnya pemahaman para pengurus koperasi mengenai pelaporan pertanggung jawaban Koperasi
  3. Dampak Pandemi Covid-19 terhadap UKM
  4. Penumbuhan UKM sebagai wirausaha baru dan produktif
- c. Urusan Pilihan Perindustrian
  1. Belum Memadainya Infrastruktur industri dan infrastruktur penunjang termasuk konektivitas antar wilayah.
  2. Terbatasnya sumber daya manusia industri
  3. Rendahnya komitmen dan respon stakeholder dalam bekerjasama untuk menyelesaikan masalah
  4. Sulitnya mendapatkan lahan yang sesuai kebutuhan industri dan harga yang masih relatif tinggi.
  5. Kelembagaan belum efektif
- d. Urusan Pilihan Perdagangan



1. Terbatasnya Ekspor Komoditi dan Produk non Migas non Batubara
2. Rendahnya Daya Saing Produk yang dipasarkan
3. Belum optimalnya Pemanfaatan peluang Ekspor langsung di Kalimantan Timur.
4. Terbatasnya Jangkauan Pemasaran komoditi dan produk ekspor
5. Terbatasnya produksi dan sarana distribusi bahan pokok
6. Belum optimal fasilitasi sistem distribusi perdagangan
7. Belum optimal Kerjasama Perdagangan
8. Konsumen Kalimantan Timur pada umumnya masih pada tahap mampu belum kritis.
9. Belum adanya peran aktif masyarakat menggunakan hak dan kewajiban sebagai konsumen
10. Pelaku usaha masih ada yang belum patuh
11. Belum optimal pemanfaatan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Kalimantan Timur
12. Stabilitas Harga Kebutuhan Masyarakat dan Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu-isu penting yang menjadi masalah-masalah mendesak yaitu antara lain :

1. Perlunya peningkatan kinerja dan profesionalisme aparatur ;
2. Perlunya peningkatan kualitas manajemen dan produktivitas Koperasi
3. Kebijakan untuk mendorong tercapainya jumlah RAT Koperasi
4. Sosialisasi tentang Manajemen Perkoperasian
5. Perlu nya Forum FGD lintas Sektor membahas Kawasan Ekonomi khusus
6. Perlunya operasi pasar atau pasar murah agar penstabilkan harga barang pokok yang naik
7. Sosialisasi konsumen cerdas dan pelaku usaha taat SNI

#### **2.4. Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD**

Rancangan Akhir RKPD 2023 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja OPD Tahun 2023. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur. Secara Keseluruhan hasil telaahan terhadap Rancangan Akhir RKPD dapat dilihat pada tabel 2.3

Tabel 2.3. Review Terhadap Rankir RKPD Tahun 2023

Sumber Anggaran : APBD

Unit Organisasi : 3.31.3.30.2.17.01.00 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

RANCANGAN AKHIR RKPD							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif		
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			33,815,598,750	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			33,815,598,750		
2	171		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	90 %	31,565,598,750		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	90 %	31,565,598,750	
2	171.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitasi Kinerja PD	73 nilai	1,408,585,000		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitasi Kinerja PD	73 nilai	1,408,585,000	
2	171.01.1	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	718,985,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	718,985,000	

RANCANGAN AKHIR RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
21711.016	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dokumen	689,600,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dokumen	689,600,000	
21711.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		persentase Laporan yang disusun sesuai Ketentuan	100 %	<b>20,592,501,279</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		persentase Laporan yang disusun sesuai Ketentuan	100 %	<b>20,592,501,279</b>	
21711.021	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 orang/bulan	14,948,802,995	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 orang/bulan	14,948,802,995	
21711.022	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	25 Dokumen	5,604,058,784	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	25 Dokumen	5,604,058,784	
21711.025	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	10,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	10,000,000	
21711.026	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kota Samarinda, Sungai Kunjang,	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dokumen	9,930,000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kota Samarinda, Sungai Kunjang,	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dokumen	9,930,000	

RANCANGAN AKHIR RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
		Karang Anyar					Karang Anyar				
21711.027	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	19,709,500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	19,709,500	
21711.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		Jumlah PNS Yang Mengikuti Pelatihan/Bimtek	60 orang	<b>1,212,200,000</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		Jumlah PNS Yang Mengikuti Pelatihan/Bimtek	60 orang	<b>1,212,200,000</b>	
21711.052	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	212,500,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	212,500,000	
21711.059	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 orang	999,700,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 orang	999,700,000	
21711.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		Jumlah Bulan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	<b>674,937,000</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		Jumlah Bulan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	<b>674,937,000</b>	

RANCANGAN AKHIR RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING	
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif		
21711.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	106,864,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	106,864,000	
21711.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8000 paket	390,083,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8000 paket	390,083,000	
21711.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	150,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	150,000,000	
21711.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1920 Dokumen	27,990,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1920 Dokumen	27,990,000	
21711.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Disperindagkop	25 unit	<b>4,024,099,000</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Disperindagkop	25 unit	<b>4,024,099,000</b>	
21711.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 unit	494,410,000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 unit	494,410,000	

RANCANGAN AKHIR RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING	
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif		
21711.07	5	Pengadaan Mebel	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 paket	2,988,670,000	Pengadaan Mebel	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 paket	2,988,670,000	
21711.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 unit	535,937,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 unit	535,937,000	
21711.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggah	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 unit	5,082,000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggah	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 unit	5,082,000	usulan penambahan Dana sebesar Rp 28.8 Milyar
21711.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Disperindagkop	12 bulan	<b>2,146,680,576</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Disperindagkop	12 bulan	<b>2,146,680,576</b>	
21711.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	10,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	10,000,000	
21711.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	814,134,576	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	814,134,576	

RANCANGAN AKHIR RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
21711.084	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	1,322,546,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	1,322,546,000	
21711.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		jumlah bulan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Disperindagkop	12 bulan	<b>1,506,595,895</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		jumlah bulan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Disperindagkop	12 bulan	<b>1,506,595,895</b>	
21711.091	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	35 unit	546,589,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	35 unit	546,589,000	
21711.0910	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 unit	960,006,895	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 unit	960,006,895	
2173	<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>		Persentase tercapainya target Koperasi sehat	10 %	<b>583,040,000</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>		Persentase tercapainya target Koperasi sehat	10 %	<b>583,040,000</b>	
21731.01	<b>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>		jumlah Koperasi yang dilakukan pengawasan	30 Koperasi	<b>583,040,000</b>	<b>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>		jumlah Koperasi yang dilakukan pengawasan	30 Koperasi	<b>583,040,000</b>	



RANCANGAN AKHIR RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
21731.012	Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Koperasi Yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan dan Tersedianya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	20 unit usaha	583,040,000	Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Koperasi Yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan dan Tersedianya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	20 unit usaha	583,040,000	
2175	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>		jumlah Koperasi dan UKM yang Terlatih (DAK)	520 Koperasi dan UKM	<b>1,000,000</b>	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>		jumlah Koperasi dan UKM yang Terlatih (DAK)	520 Koperasi dan UKM	<b>1,000,000</b>	
21751.01	<b>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>		jumlah peserta Pelatihan Koperasi dan UKM (DAK)	500 orang	<b>1,000,000</b>	<b>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>		jumlah peserta Pelatihan Koperasi dan UKM (DAK)	500 orang	<b>1,000,000</b>	
21751.011	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (DAK)	500 orang	1,000,000	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (DAK)	500 orang	1,000,000	dana Alokasi Khusus Non Fisik P2KUKM menunggu dari Kementerian Koperasi UKM
2176	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>		Jumlah Koperasi berkualitas	10 Koperasi	<b>874,660,000</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>		Jumlah Koperasi berkualitas	10 Koperasi	<b>874,660,000</b>	

RANCANGAN AKHIR RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
21761.01	<b>Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>		jumlah Koperasi yang Melakukan RAT	25 koperasi	<b>874,660,000</b>	<b>Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>		jumlah Koperasi yang Melakukan RAT	25 koperasi	<b>874,660,000</b>	
21761.01 2	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	JJumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	150 unit usaha	874,660,000	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	JJumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	150 unit usaha	874,660,000	
2177	<b>PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>		Persentase tercapainya target UKM naik kelas	1 %	<b>463,700,000</b>	<b>PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>		Persentase tercapainya target UKM naik kelas	1 %	<b>463,700,000</b>	
21771.01	<b>Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan</b>		Jumlah Wira Usaha Pemula	10 Wirausaha Pemula	<b>463,700,000</b>	<b>Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan</b>		Jumlah Wira Usaha Pemula	10 Wirausaha Pemula	<b>463,700,000</b>	

RANCANGAN AKHIR RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING	
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif		
21771.01	1	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	200 unit usaha	463,700,000	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	200 unit usaha	463,700,000	
2178		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>		Persentase pertumbuhan UKM yang menggunakan platform pasar berbasis digital	3 %	<b>327,600,000</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>		Persentase pertumbuhan UKM yang menggunakan platform pasar berbasis digital	3 %	<b>327,600,000</b>	
21781.01		<b>Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah</b>		Jumlah wira usaha mandiri	1 wirausaha	<b>327,600,000</b>	<b>Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah</b>		Jumlah wira usaha mandiri	1 wirausaha	<b>327,600,000</b>	
21781.01	1	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	50 unit usaha	327,600,000	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	50 unit usaha	327,600,000	
3		<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>					<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>					
330		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>				<b>4,650,000,000</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>				<b>4,650,000,000</b>	

RANCANGAN AKHIR RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
3302	<b>PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN</b>		Jumlah Eksportir yang aktif menggunakan SKA	260 Eksportir	<b>208,820,000</b>	<b>PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN</b>		Jumlah Eksportir yang aktif menggunakan SKA	260 Eksportir	<b>208,820,000</b>	
33021.04	<b>Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)</b>		jumlah SKA yang diterbitkan	4000 lembar	<b>208,820,000</b>	<b>Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)</b>		jumlah SKA yang diterbitkan	4000 lembar	<b>208,820,000</b>	
33021.041	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	3500 Dokumen	208,820,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	3500 Dokumen	208,820,000	
3304	<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING</b>		Persentase stabilitas harga bapokting	80 %	<b>968,489,000</b>	<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING</b>		Persentase stabilitas harga bapokting	80 %	<b>968,489,000</b>	
33041.01	<b>Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi</b>		Laporan Ketersediaan Bapokting	12 bulan	<b>345,382,000</b>	<b>Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi</b>		Laporan Ketersediaan Bapokting	12 bulan	<b>345,382,000</b>	

RANCANGAN AKHIR RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING	
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif		
33041.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	6 kegiatan	345,382,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	6 kegiatan	345,382,000	
33041.02		<b>Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan</b>		Jumlah Komoditi Bapokting yang Dipantau	21 jenis komoditi	<b>623,107,000</b>	<b>Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan</b>		Jumlah Komoditi Bapokting yang Dipantau	21 jenis komoditi	<b>623,107,000</b>	
33041.02	1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	12 Laporan	538,182,000	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	12 Laporan	538,182,000	

RANCANGAN AKHIR RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING	
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif		
33041.02	2	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	10 Laporan	84,925,000	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	10 Laporan	84,925,000	
3305		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>		Persentase pertumbuhan nilai ekspor non migas dan non batubara	5 %	<b>792,800,000</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>		Persentase pertumbuhan nilai ekspor non migas dan non batubara	5 %	<b>792,800,000</b>	
33051.01		<b>Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi</b>		Jumlah Calon Eksportir dan Eksportir yang Mendapatkan Akses Pasar Ekspor (orang)	2 orang	<b>792,800,000</b>	<b>Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi</b>		Jumlah Calon Eksportir dan Eksportir yang Mendapatkan Akses Pasar Ekspor (orang)	2 orang	<b>792,800,000</b>	
33051.01	3	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	2 Pelaku Usaha	421,610,000	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	2 Pelaku Usaha	421,610,000	
33051.01	5	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	2 pelaku usaha	371,190,000	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	2 pelaku usaha	371,190,000	

RANCANGAN AKHIR RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
3306	<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	an, Semua Kelurahan	Persentase peningkatan pengawasan barang beredar dan/atau jasa SNI wajib yang diawasi	15 %	2,000,000,000	<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	an, Semua Kelurahan	Persentase peningkatan pengawasan barang beredar dan/atau jasa SNI wajib yang diawasi	15 %	2,000,000,000	
33061.01	<b>Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota</b>		konsumen yang telah diberikan edukasi	1000 orang	1,462,000,000	<b>Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota</b>		konsumen yang telah diberikan edukasi	1000 orang	1,462,000,000	
33061.011	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	3 BPSK	780,000,000	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	3 BPSK	780,000,000	
33061.013	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani	20 Pengaduan	682,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani	20 Pengaduan	682,000,000	
33061.03	<b>Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota</b>		jumlah barang dan jasa yang sesuai Ketentuan	27 jenis	538,000,000	<b>Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota</b>		jumlah barang dan jasa yang sesuai Ketentuan	27 jenis	538,000,000	

RANCANGAN AKHIR RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING	
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif		
33061.03	1	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	3 Laporan	538,000,000	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	3 Laporan	538,000,000	
3307		<b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>		Peningkatan Jumlah Produk Dalam Negeri Yang difasilitasi pemasaran	5 Produk	<b>679,891,000</b>	<b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>		Peningkatan Jumlah Produk Dalam Negeri Yang difasilitasi pemasaran	5 Produk	<b>679,891,000</b>	
33071.02		<b>Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri</b>		Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi Pemasaran	10 pelaku usaha	<b>679,891,000</b>	<b>Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri</b>		Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi Pemasaran	10 pelaku usaha	<b>679,891,000</b>	
33071.02	1	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	14 UMKM	679,891,000	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	14 UMKM	679,891,000	
331		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>				<b>3,185,000,000</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>				<b>3,185,000,000</b>	
3312		<b>PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>		Jumlah Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara di kawasan peruntukan industri	2 Industri	<b>1,983,000,000</b>	<b>PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>		Jumlah Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara di kawasan peruntukan industri	2 Industri	<b>1,983,000,000</b>	



RANCANGAN AKHIR RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
33121.01	<b>Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi</b>		Jumlah pelaksanaan rencana pembangunan industri provinsi	5 Dokumen	<b>1,983,000,000</b>	<b>Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi</b>		Jumlah pelaksanaan rencana pembangunan industri provinsi	5 Dokumen	<b>1,983,000,000</b>	
33121.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	3 Dokumen	316,402,000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	3 Dokumen	316,402,000	
33121.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	112,890,000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	112,890,000	
33121.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	5 Dokumen	1,417,294,000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	5 Dokumen	1,417,294,000	
33121.01	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	136,414,000	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	136,414,000	

RANCANGAN AKHIR RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
3313	<b>PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI</b>		Persentase pengendalian izin usaha sektor industri terhadap jumlah industri yang terdata	5 %	721,000,000	<b>PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI</b>		Persentase pengendalian izin usaha sektor industri terhadap jumlah industri yang terdata	5 %	721,000,000	
33131.01	<b>Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi</b>		Jumlah industri yang dilakukan pemantauan dan pengawasan dalam penerbitan perizinan	22 industri	721,000,000	<b>Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi</b>		Jumlah industri yang dilakukan pemantauan dan pengawasan dalam penerbitan perizinan	22 industri	721,000,000	
33131.011	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam Rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	7 Dokumen	250,000,000	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam Rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	7 Dokumen	250,000,000	
33131.012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI,	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan Di Bidang Industri dalam Lingkup perizinan Usaha	10 Dokumen	471,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI,	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan Di Bidang Industri	10 Dokumen	471,000,000	

RANCANGAN AKHIR RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	dan IPKI Kewenangan Provinsi	Semua Kelurahan	Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Provinsi			IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi	Semua Kelurahan	dalam Lingkup perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Provinsi			
3314	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>		Jumlah industri daerah yang dapat dipantau perkembangannya	10 Industri	<b>481,000,000</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>		Jumlah industri daerah yang dapat dipantau perkembangannya	10 Industri	<b>481,000,000</b>	
3314.01	<b>Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)</b>		jumlah industri yang memiliki IUI, IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan provinsi	10 industri	<b>481,000,000</b>	<b>Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)</b>		jumlah industri yang memiliki IUI, IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan provinsi	10 industri	<b>481,000,000</b>	
3314.01.1	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	4 Dokumen	117,008,000	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	4 Dokumen	117,008,000	

RANCANGAN AKHIR RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
33141.01	2 Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	1 Dokumen	97,000,000	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	1 Dokumen	97,000,000	
33141.01	3 Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	5 Dokumen	266,992,000	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	5 Dokumen	266,992,000	
3	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>					<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>					
30	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>				<b>4,035,264,308</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>					<b>4,035,264,308</b>
301	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>		Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	90 %	<b>2,606,248,308</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>		Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	90 %	<b>2,606,248,308</b>	
301.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		persentase laporan yang disusun sesuai ketentuan	100 %	<b>1,394,337,248</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		persentase laporan yang disusun sesuai ketentuan	100 %	<b>1,394,337,248</b>	
3301.02	2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Samarinda, Sungai	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	183 Dokumen	1,394,337,248	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Samarinda, Sungai Kunjang,	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	183 Dokumen	1,394,337,248	

RANCANGAN AKHIR RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
		Kunjang, Karang Anyar					Karang Anyar	Pelaksanaan Tugas ASN			
33011.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		Jumlah PNS yang Mengikuti Pelatihan/Bimtek	10 Orang	<b>100,800,000</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		Jumlah PNS yang Mengikuti Pelatihan/Bimtek	10 Orang	<b>100,800,000</b>	
33011.059	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 orang	100,800,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 orang	100,800,000	
33011.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		Jumlah Bulan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	<b>148,172,440</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		Jumlah Bulan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	<b>148,172,440</b>	
33011.061	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	10,290,810	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	10,290,810	
33011.062	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 paket	68,856,630	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 paket	68,856,630	
33011.064	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1500 paket	20,160,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1500 paket	20,160,000	

RANCANGAN AKHIR RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
33011.065	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	30 paket	45,025,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	30 paket	45,025,000	
33011.066	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	3,840,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	3,840,000	
33011.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Disperindagkop	25 unit	<b>138,946,380</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Disperindagkop	25 unit	<b>138,946,380</b>	
33011.076	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 paket	138,946,380	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 paket	138,946,380	
33011.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Disperindagkop	12 bulan	<b>460,539,800</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Disperindagkop	12 bulan	<b>460,539,800</b>	
33011.081	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50 Laporan	10,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50 Laporan	10,000,000	

RANCANGAN AKHIR RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING	
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif		
33011.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	150,558,800	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	150,558,800	
33011.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	299,981,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	299,981,000	
33011.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		jumlah bulan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Disperindagkop	12 bulan	<b>363,452,440</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		jumlah bulan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Disperindagkop	12 bulan	<b>363,452,440</b>	
33011.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 unit	80,249,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 unit	80,249,000	
33011.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit	126,870,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit	126,870,000	
33011.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 unit	156,333,440	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 unit	156,333,440	

RANCANGAN AKHIR RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
3306	<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>		Persentase capaian target sertifikat mutu barang	100 %	<b>1,429,016,000</b>	<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>		Persentase capaian target sertifikat mutu barang	100 %	<b>1,429,016,000</b>	
33061.02	<b>Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota</b>		persentase pelaksanaan pengujian dan sertifikasi mutu produk	100 %	<b>1,429,016,000</b>	<b>Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota</b>		persentase pelaksanaan pengujian dan sertifikasi mutu produk	100 %	<b>1,429,016,000</b>	
33061.02	1 Verifikasi Mutu Produk	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Komoditi Potensial yang Dipantau	3 komoditi	297,624,000	Verifikasi Mutu Produk	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Komoditi Potensial yang Dipantau	3 komoditi	297,624,000	
33061.02	2 Pengembangan Layanan Pengujian	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengujian Mutu Barang	60 Dokumen	259,884,000	Pengembangan Layanan Pengujian	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengujian Mutu Barang	60 Dokumen	259,884,000	
33061.02	3 Pengembangan Layanan Sertifikasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sertifikat Produk yang Diterbitkan	1 Sertifikat	271,000,000	Pengembangan Layanan Sertifikasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sertifikat Produk yang Diterbitkan	1 Sertifikat	271,000,000	
33061.02	4 Pengembangan Layanan Kalibrasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan	Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan	2215 Sertifikat	600,508,000	Pengembangan Layanan Kalibrasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan	2215 Sertifikat	600,508,000	



RANCANGAN AKHIR RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING	
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif		
		an, Semua Kelurahan					Kelurahan					
2		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>					
2	17	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>				<b>3,053,897,942</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>				<b>3,053,897,942</b>	
2	171		Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	90 %	<b>2,553,061,942</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>		Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	90 %	<b>2,553,061,942</b>		
2	171	1.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	persentase laporan yang disusun sesuai ketentuan	100 %	<b>1,409,397,792</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	persentase laporan yang disusun sesuai ketentuan	100 %	<b>1,409,397,792</b>		
2	171	1.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	1,409,397,792	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	1,409,397,792
2	171	1.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Jumlah PNS/NONPNS Yang Mengikuti Pelatihan/Bimtek	25 orang	<b>59,804,000</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Jumlah PNS/NONPNS Yang Mengikuti Pelatihan/Bimtek	25 orang	<b>59,804,000</b>		
2	171	1.05	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang	59,804,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang	59,804,000
2	171	1.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	<b>131,305,750</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	<b>131,305,750</b>		

RANCANGAN AKHIR RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
21711.06	1	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket	21,510,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket	21,510,000	
21711.06	4	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 paket	67,955,750	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 paket	67,955,750	
21711.06	5	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	38,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	38,000,000	
21711.06	6	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	3,840,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	3,840,000	
21711.07			Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Disperindagkop	25 unit	<b>99,375,000</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Disperindagkop	25 unit	<b>99,375,000</b>	
21711.07	6	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	21 unit	99,375,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	21 unit	99,375,000	

RANCANGAN AKHIR RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING	
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif		
2	171.08	Pinang Dalam					Pinang Dalam					
2	171.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Disperindagkop	12 bulan	194,990,800		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Disperindagkop	12 bulan	194,990,800	
2	171.08	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	400 Laporan	4,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	400 Laporan	4,000,000	
2	171.08	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	190,990,800	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	190,990,800	
2	171.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Disperindagkop	12 bulan	658,188,600		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Disperindagkop	12 bulan	658,188,600	
2	171.09	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 unit	71,006,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 unit	71,006,000	
2	171.09	Kota Samarinda, Sungai Pinang,	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	80 unit	85,705,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Samarinda, Sungai Pinang,	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	80 unit	85,705,000	

RANCANGAN AKHIR RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
		Sungai Pinang Dalam					Sungai Pinang Dalam				
21711.097	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	2 unit	501,477,600	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	2 unit	501,477,600	
2175	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>		Jumlah Koperasi dan UKM yang Terlatih	300 Koperasi dan UKM	<b>500,836,000</b>	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>		Jumlah Koperasi dan UKM yang Terlatih	300 Koperasi dan UKM	<b>500,836,000</b>	
21751.01	<b>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>		jumlah Koperasi dan UKM yang Mengikuti Pelatihan	300 Koperasi dan UKM	<b>500,836,000</b>	<b>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>		jumlah Koperasi dan UKM yang Mengikuti Pelatihan	300 Koperasi dan UKM	<b>500,836,000</b>	
21751.011	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	240 orang	500,836,000	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	240 orang	500,836,000	
<b>TOTAL</b>					<b>48,739,761,000</b>					<b>48,739,761,000</b>	

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian yang diusulkan pemangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas (bottom-up planning) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah. Untuk selanjutnya dilakukan penelaahan kesesuaian usulan dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dan mengakomodasi usulan yang sesuai dengan program/kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah.

Penelaahan usulan pemangku kepentingan sebagai berikut :

1. Optimalisasi peran provinsi sebagai wakil pemerintah pusat dalam hal kordinasi, integrasi, sinkronisasi serta perencanaan pembangunan.
2. Peningkatan SDM dan Pendapatan UKM dan Koperasi provinsi Kalimantan Timur .

Berikut hasil dari Forum Perangkat Daerah yang merangkum usulan Dinas Perindagkop Kabupaten/Kota :

Tabel 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Catatan Penting
2	17	3			<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>		Persentase tercapainya target Koperasi sehat	10 %	
2	17	3	1.01		<b>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>		jumlah Koperasi yang dilakukan pengawasan	30 Koperasi	
2	17	3	1.01	2	Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Koperasi Yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan dan Tersedianya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	20 unit usaha	
2	17	5			<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>		jumlah Koperasi dan UKM yang Terlatih (DAK)	520 Koperasi dan UKM	
2	17	5	1.01		<b>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>		jumlah peserta Pelatihan Koperasi dan UKM (DAK)	500 orang	
2	17	5	1.01	1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (DAK)	500 orang	Dana Alokasi Khusus Non Fisik P2KUKM menunggu dari Kementerian Koperasi UKM

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Catatan Penting
2	17	6			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>		Jumlah Koperasi berkualitas	10 Koperasi	
2	17	6	1.01		<b>Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>		jumlah Koperasi yang Melakukan RAT	25 koperasi	
2	17	6	1.01	2	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	150 unit usaha	
2	17	7			<b>PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>		Persentase tercapainya target UKM naik kelas	1 %	
2	17	7	1.01		<b>Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan</b>		Jumlah Wira Usaha Pemula	10 Wirausaha Pemula	
2	17	7	1.01	1	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	200 unit usaha	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Catatan Penting
2	17	8			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>		Persentase pertumbuhan UKM yang menggunakan platform pasar berbasis digital	3 %	
2	17	8	1.01		<b>Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah</b>		Jumlah wira usaha mandiri	1 wirausaha	
2	17	8	1.01	1	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	50 unit usaha	
3					<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>				
3	30				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>				
3	30	2			<b>PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN</b>		Jumlah Eksportir yang aktif menggunakan SKA	260 Eksportir	
3	30	2	1.04		<b>Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)</b>		jumlah SKA yang diterbitkan	4000 lembar	
3	30	2	1.04	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	3500 Dokumen	
3	30	4			<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING</b>		Persentase stabilitas harga bapokting	80 %	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Catatan Penting
3	30	4	1.01		<b>Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi</b>		Laporan Ketersediaan Bapokting	12 bulan	
3	30	4	1.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	6 kegiatan	
3	30	4	1.02		<b>Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan</b>		Jumlah Komoditi Bapokting yang Dipantau	21 jenis komoditi	
3	30	4	1.02	1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	12 Laporan	
3	30	4	1.02	2	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	10 Laporan	
3	30	5			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>		Persentase pertumbuhan nilai ekspor non migas dan non batubara	5 %	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Catatan Penting
3	30	5	1.01	<b>Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi</b>		Jumlah Calon Eksportir dan Eksportir yang Mendapatkan Akses Pasar Ekspor (orang)	2 orang	
3	30	5	1.01	3 Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	2 Pelaku Usaha	
3	30	5	1.01	5 Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	2 pelaku usaha	
3	30	6		<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>		Persentase peningkatan pengawasan barang beredar dan/atau jasa SNI wajib yang diawasi	15 %	
3	30	6	1.01	<b>Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota</b>		konsumen yang telah diberikan edukasi	1000 orang	
3	30	6	1.01	1 Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	3 BPSK	
3	30	6	1.01	3 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani	20 Pengaduan	
3	30	6	1.03	<b>Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota</b>		jumlah barang dan jasa yang sesuai Ketentuan	27 jenis	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Catatan Penting
3	30	6	1.03	1	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	3 Laporan	
<b>3</b>	<b>30</b>	<b>7</b>			<b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>		Peningkatan Jumlah Produk Dalam Negeri Yang difasilitasi pemasaran	5 Produk	
<b>3</b>	<b>30</b>	<b>7</b>	1.02		<b>Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri</b>		Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi Pemasaran	10 pelaku usaha	
3	30	7	1.02	1	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	14 UMKM	
<b>3</b>	<b>31</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>				
<b>3</b>	<b>31</b>	<b>2</b>			<b>PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>		Jumlah Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara di kawasan peruntukan industri	2 Industri	
<b>3</b>	<b>31</b>	<b>2</b>	1.01		<b>Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi</b>		Jumlah pelaksanaan rencana pembangunan industri provinsi	5 Dokumen	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Catatan Penting
3	31	2	1.01	2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	3 Dokumen	
3	31	2	1.01	3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	
3	31	2	1.01	5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	5 Dokumen	
3	31	2	1.01	6	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	
<b>3</b>	<b>31</b>	<b>3</b>			<b>PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI</b>		Persentase pengendalian izin usaha sektor industri terhadap jumlah industri yang terdata	5 %	
<b>3</b>	<b>31</b>	<b>3</b>	1.01		<b>Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi</b>		Jumlah industri yang dilakukan pemantauan dan pengawasan dalam penerbitan perizinan	22 industri	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Catatan Penting
3	31	3	1.01	1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam Rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah- Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	7 Dokumen	
3	31	3	1.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan Di Bidang Industri dalam Lingkup perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Provinsi	10 Dokumen	
3	31	4			<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>		Jumlah industri daerah yang dapat dipantau perkembangannya	10 Industri	
3	31	4	1.01		<b>Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)</b>		jumlah industri yang memiliki IUI, IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan provinsi	10 industri	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Catatan Penting
3	31	4	1.01	1	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	4 Dokumen	
3	31	4	1.01	2	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	1 Dokumen	
3	31	4	1.01	3	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	5 Dokumen	
<b>3</b>	<b>30</b>	<b>6</b>			<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>		Persentase capaian target sertifikat mutu barang	100 %	
<b>3</b>	<b>30</b>	<b>6</b>	1.02		<b>Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota</b>		persentase pelaksanaan pengujian dan sertifikasi mutu produk	100 %	
3	30	6	1.02	1	Verifikasi Mutu Produk	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Komoditi Potensial yang Dipantau	3 komoditi	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Catatan Penting
3	30	6	1.02	2	Pengembangan Layanan Pengujian	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengujian Mutu Barang	60 Dokumen	
3	30	6	1.02	3	Pengembangan Layanan Sertifikasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sertifikat Produk yang Diterbitkan	1 Sertifikat	
3	30	6	1.02	4	Pengembangan Layanan Kalibrasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan	2215 Sertifikat	
<b>2</b>	<b>17</b>	<b>5</b>			<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>		Jumlah Koperasi dan UKM yang Terlatih	300 Koperasi dan UKM	
<b>2</b>	<b>17</b>	<b>5</b>	1.01		<b>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>		jumlah Koperasi dan UKM yang Mengikuti Pelatihan	300 Koperasi dan UKM	
2	17	5	1.01	1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	240 orang	

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Sesuai dengan tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2023, ditetapkan arah kebijakan pembangunan untuk tahun 2023 adalah pemulihan ekonomi dan reformasi struktural melalui pemulihan daya beli dan usaha, diversifikasi ekonomi yang didukung dengan reformasi iklim investasi, reformasi kelembagaan, serta reformasi peningkatan kualitas SDM dan perlindungan social, berikut arah kebijakan RKP tahun 2023 :

1. Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural
2. Diversifikasi Ekonomi
3. Pemulihan daya beli dan usaha
4. Reformasi perlindungan Sosial
5. Reformasi Peningkatan Kualitas SDM
6. Reformasi Iklim Investasi
7. Reformasi Kelembagaan

Sebagai operasionalisasi dari arah kebijakan, disusun sepuluh strategi pembangunan, yakni (1) meningkatkan nilai tambah sektor industri, (2) mempercepat pemulihan dan pertumbuhan sektor pariwisata, (3) meningkatkan ketahanan pangan masyarakat, (4) meningkatkan peran UMKM terhadap ekonomi nasional, (5) meningkatkan pemerataan infrastruktur, (6) meningkatkan pemerataan dan kualitas layanan digital, (7) meningkatkan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK), (8) mempercepat reformasi perlindungan sosial, (9) meningkatkan kualitas SDM dan inovasi, serta (10) memperkuat sistem kesehatan nasional dan penanganan Covid-19.

Berdasarkan Rancangan RKP tahun 2023 kebijakan nasional sektor Koperasi, Industri dan Perdagangan adalah sebagai berikut:



A. Sektor Koperasi & UKM

1. Meningkatkan peran UMKM terhadap ekonomi Nasional
2. Perhatian khusus pada usaha mikro kecil dengan program Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).
3. Mendorong terwujudnya kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha melalui program Fasilitasi Sertifikasi HAKI.
4. Penyediaan sarana prasarana pendukung kegiatan ekonomi dengan program Pasar Rakyat yang dikelola Koperasi termasuk di daerah tertinggal dan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT).
5. Pengembangan Kewirausahaan melalui program Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan, Perkoperasian, Keterampilan Teknis dan Manajerial.

Berkaitan Kebijakan Nasional di sektor Koperasi, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur dalam penyusunan program kegiatan tahun 2023 telah selaras dengan kebijakan nasional tersebut. Program yang telah dilaksanakan dan yang akan direncanakan di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan rencana kerja yang disusun adalah sebagai berikut Pengembangan Kewirausahaan melalui program Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan, Perkoperasian, Keterampilan Teknis dan Manajerial, program ini dilaksanakan dalam rangka membantu usaha mikro kecil dalam memperoleh akses pembiayaan dan Meningkatkan peran UMKM terhadap ekonomi Nasional.

Dalam hal mendorong terwujudnya kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha telah dilaksanakan program yang membantu pengembangan usaha KUKM. Demikian pula halnya kebijakan pengembangan kewirausahaan telah dilaksanakan dan direncanakan program pendidikan dan pelatihan bagi koperasi, pelatihan

kewirausahaan, pelatihan manajerial bagi pengurus koperasi dan pelatihan ketrampilan teknis bagi bagi pelaku koperasi. Kebijakan nasional penyediaan sarana prasarana pendukung kegiatan ekonomi, dalam hal ini revitalisasi pasar dan PLUT merupakan kegiatan yang sangat penting bagi pengembangan Koperasi dan UKM di Kalimantan Timur, akan tetapi menimbang kondisi fiskal Provinsi Kalimantan Timur pada saat ini, kebijakan tersebut masih belum memungkinkan untuk dilaksanakan. Berdasarkan kondisi tersebut diatas sangat diharapkan dukungan pendanaan dari pusat melalui DAK agar kegiatan revitalisasi pasar dan PLUT dapat diwujudkan di Kalimantan Timur.

## B. Sektor Industri

1. Meningkatkan Nilai Tambah sektor Industri
2. Pertumbuhan Industri :
  - a. Pengembangan Perwilayahan Industri diluar pulau jawa
  - b. Penumbuhan Populasi industri dengan menambah paling tidak sekitar 9 ribu usaha.
  - c. Peningkatan daya saing dan produktivitas (nilai ekspor dan nilai tambah per tenaga kerja)
3. Pembangunan kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di luar Jawa :
  - a. Pengembangan Potensi Ekonomi Wilayah, melalui percepatan industrialisasi/hilirisasi pengolahan SDA, Menciptakan nilai tambah, menciptakan kesempatan kerja baru, terutama industri manufaktur, industri pangan, industri maritim dan pariwisata.
  - b. Percepatan Pembangunan Konektivitas/Infrastruktur.
  - c. Pengembangan SDM dan IPTEK.
  - d. Pengembangan regulasi dan Kebijakan
  - e. Peningkatan iklim investasi dan iklim usaha antara lain : Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan pemberian Insentif fiskal dan non-fiskal.

Berkaitan dengan Kebijakan Pembangunan Industri Nasional berdasarkan arah pembangunan kebijakan nasional, jika dikaitkan dengan Visi dan Misi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM sudah sejalan dan selaras. Dimana pada sektor industri, Provinsi Kalimantan Timur memiliki 3 (tiga) Kawasan Industri, yaitu Kawasan Ekonomi khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (KEK MBTK), Kawasan Industri Kariangau (KIK) dan Kaltim Industrial Estate (KIE).

Berlokasi di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2014 dengan total luas area sebesar 557,34 Ha. Kawasan ini kaya akan sumber daya alam terutama kelapa sawit, kayu dan energi didukung dengan posisi geostrategis yaitu terletak pada lintasan Alur Laut Kepulauan Indonesia II (ALKI II). ALKI II merupakan lintasan laut perdagangan internasional yang menghubungkan Pulau Kalimantan dan Sulawesi, serta merupakan jalur regional lintas trans Kalimantan dan transportasi penyeberangan ferry Tarakan-Tolitoli, dan Balikpapan-Mamuju.

KEK MBTK diharapkan dapat mendorong penciptaan nilai tambah melalui industrialisasi atas berbagai komoditi di wilayah tersebut. Berdasarkan keunggulan geostrategis wilayah Kutai Timur, KEK MBTK akan menjadi pusat pengolahan kelapa sawit dan produk turunannya.

Kawasan Industri Kariangau (KIK) berlokasi di Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat dengan menempati area seluas 133 Ha, dengan rencana pengembangan hingga 3.565 Ha yang selanjutnya akan dikembangkan hingga ke Pulau Balang. KIK memiliki letak strategis karena berada di teluk Balikpapan yang berhadapan langsung dengan selat Makassar yang merupakan bagian dari Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI II), posisi strategis tersebut memudahkan dalam mobilisasi barang untuk tujuan domestik maupun

mancanegara (ekspor-impor). Hal ini ditunjang dengan kedalaman laut Teluk Balikpapan yang dapat dilalui dengan kapal berkapasitas 50.000 ton. Kawasan Industri Kariangau dibangun untuk mengakomodir pembangunan industri kimia, batubara, pengolahan kayu, pengeboran minyak, pupuk dan aneka industri lainnya. Hingga saat ini tercatat ada sekitar 20 pabrik yang sudah mengantongi izin membuat pabrik, dimana 13 diantaranya sudah beroperasi menyerap sekitar 4.000 tenaga kerja. Perusahaan yang sudah beroperasi antara lain bergerak dalam pengolahan CPO (Crude Palm Oil), pertambangan, batubara, dan migas, industri perkapalan, industri logam, tekstil perkayuan, serta pergudangan. Dalam menjalankan fungsinya, Kawasan Industri Kariangau didukung oleh infrastruktur terminal peti kemas, pembangkit tenaga listrik, jalan akses, jembatan dan jalan tol.

PT. Kaltim Industrial Estate (KIE), awalnya bergerak di bidang pengelolaan kawasan industri yang menyediakan lahan bagi berbagai perusahaan berbasis gas bumi, yang didirikan pada tanggal 29 Agustus 1990 di Bontang oleh PT. Pupuk Kalimantan Timur (PT. Pupuk Kaltim). Kini PT. KIE telah berkembang menjadi diversified firm sehingga saat ini ada lima pilar bisnis yakni : Kawasan Industri, Rekayasa dan Konstruksi, Properti, Beton dan Trading. Komitmen jajaran PT. KIE untuk senantiasa meningkatkan kualitas proses bisnis dan memahami kebutuhan konsumen, serta dukungan penuh PT. Pupuk Kaltim merupakan faktor kunci keberhasilan PT. KIE dalam mengembangkan bisnis-bisnis ini.

PT. KIE merupakan anak perusahaan dari PT. Pupuk Kaltim yang juga merupakan pengelola Kaltim Industrial Estate dengan luas ± 230 Ha, kepemilikan saham sebesar 99,99% PT. Pupuk Kaltim merupakan perusahaan produsen pupuk dengan kapasitas produksi urea ± 3,43 juta ton per tahun,

amoniak sebanyak  $\pm 2,74$  juta ton per tahun dan NPK  $\pm 350$  ribu ton per tahun.

### C. Sektor Perdagangan

1. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan inflasi yang rendah.
  - a. Pemantauan dan informasi harga & stok kebutuhan bahan pokok dan barang strategis.
  - b. Penyusunan Prognosa Kebutuhan Bahan Pokok dan Strategis.
  - c. Penanganan/ pemantauan jalur distribusi bahan pokok dan barang strategis.
  - d. Sebagai Anggota Tim Pengendali Inflasi Daerah Kaltim.
  - e. Sosialisasi Perlindungan Konsumen
  - f. Sosialisasi Cinta Produk Indonesia
  
2. Mendorong peningkatan kualitas produk Indonesia dan ekspor yang bernilai tambah lebih tinggi.
  - a. Pengawasan Barang Beredar di 10 Kabupaten/Kota.
  - b. Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Standarisasi Bidang Perdagangan.
  - c. Peningkatan pemanfaatan skema kerjasama perdagangan internasional.
    - Meningkatkan promosi ekspor melalui promosi terpadu (nation branding) melalui pengembangan tagline promosi bersama antar Kementerian dan pengembangan nation branding.
    - Identifikasi peluang pasar produk barang dan jasa dengan penyediaan informasi/katalog produk buatan Indonesia dan melakukan upaya aktif untuk menjadikan Indonesia pemasok jaringan produksi global.

- d. Mendorong para pengusaha untuk ekspor dan mencetak para eksportir baru.
- Pengembangan industri pengolah sumber daya alam berorientasi ekspor.
  - Peningkatan ekspor produk KUMKM melalui program kemitraan, fasilitasi ekspor diversifikasi produk dan standirisasi dan inovasi.

Program yang direncanakan pemerintah untuk tahun 2023 diatas secara umum telah bersinergi atau sejalan dengan program kegiatan yang direncanakan oleh Dinas Perindagkop dan UKM Provinsi Kalimantan Timur melalui Rencana Kerja (Renja) 2023 melalui kegiatan yang didanai oleh APBD dan didukung oleh pendanaan dari pemerintah pusat (APBN), sebagai berikut penyelarasan target Nasional dengan daerah :

Tabel 3.1 Penetapan Target Indikator Kinerja Urusan Daerah

No	Kinerja	Indikator Provinsi	Target Provinsi	Target Nasional
<b>Urusan Koperasi dan UKM</b>				
1	Terwujudnya Koperasi yang Modern	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	12%	18
2	Terwujudnya UMKM yang Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global	Meningkatnya Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	1 %	4 %
		Terfasilitasinya UKM yang Berpotensi Masuk ke Dalam Rantai Pasok dan Ekspor		70%
		Pertumbuhan Wirausaha		3.5 %
<b>Urusan Perdagangan</b>				
1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi	Pertumbuhan nilai ekspor non migas dan Non Batubara	1%	5,96% - 7.86%

No	Kinerja	Indikator Provinsi	Target Provinsi	Target Nasional
2	Terwujudnya iklim usaha yang kondusif	Tertib Usaha	70%	55%-75%
3	Meningkatnya keberdayaan dan kepercayaan konsumen	Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	100%	42%
4	Meningkatnya kepastian penyaluran pupuk /pestisida bersubsidi sesuai ketentuan jenis, jumlah, waktu, harga, mutu dan tempat	Persentase kinerja realisasi pupuk	85%	90%
5	Meningkatnya jaminan mutu komoditas potensial daerah	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	31,91 %	50%-75%
6	Meningkatnya keberdayaan dan	Persentase penanganan pengaduan konsumen	70%	91%
7	Terwujudnya kecukupan bahan pangan untuk masyarakat	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	17%	5.9%
8	Terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan	Inflasi Pangan bergejolak	1%	3%-5%
<b>Urusan Perindustrian</b>				
1	Tercapainya Peningkatan Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	Persentase Pertumbuhan PDB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	4,17%	6.8%
2	Meningkatnya Kontribusi Sektor kemampuan keuangan Daerah Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDB	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDB	9.64%	18.3%
3	Tercapainya Pertumbuhan Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas	Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas (USD Miliar)	12.55	151.9 (nilai)

No	Kinerja	Indikator Provinsi	Target Provinsi	Target Nasional
4	Meningkatnya Tenaga Kerja di Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	94916 orang	20.6 juta
5	Terwujudnya Pertumbuhan Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Non Migas (Rp. Triliun)	27,6 Triliun	425.3 Triliun

### 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sasaran merupakan tujuan terhadap sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur dalam jangka waktu tertentu, bagian integral dalam proses perencanaan strategik yang fokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas.

Adapun yang menjadi tujuan strategik Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Provinsi Kaltim Melakukan perubahan berdasarkan Perubahan RPJMD

Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
Meningkatnya Kontribusi Sektor Perindustrian dalam Perekonomian Daerah	Meningkatnya Laju Pertumbuhan Sektor industri pengolahan Non Migas dan Batubara
	Meningkatnya Nilai Ekspor Non Migas dan Non Batubara
Meningkatnya Usaha Ekonomi Koperasi dan UKM	Meningkatnya usaha ekonomi Koperasi dan UKM

Berdasarkan tujuan tersebut maka sasaran yang akan dicapai sebagai berikut:



1. Peningkatan Kapasitas Usaha Ekonomi Koperasi dan UKM

Koperasi memiliki peran yang penting dalam perekonomian daerah yaitu untuk mengurangi kemiskinan, pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Provinsi Kalimantan Timur. Koperasi berdasarkan Jenis nya terdiri dari Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen, Koperasi Pemasaran, dan Koperasi Jasa. Selama ini Koperasi simpan pinjam mendapatkan prioritas pembinaan namun dalam fungsinya sebagai pendorong pertumbuhan perekonomian daerah sangat minim. Oleh karena itu untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah akan diprioritaskan pengembangan usaha Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen, Koperasi Pemasaran, dan Koperasi Jasa. Yang akan berfokus pada peningkatan tenaga kerja, modal dan aset.

Usaha Kecil Menengah memiliki peran yang penting dalam perekonomian daerah yaitu untuk mengurangi kemiskinan, pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Provinsi Kalimantan Timur . Oleh karena itu untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah akan diprioritaskan pengembangan usaha berfokus pada UKM ekspor dan UKM memanfaatkan bahan baku lokal.

2. Peningkatan Kontribusi lapangan industri pengolahan non Migas dan non Batubara.

Hingga saat ini kondisi perekonomian Kalimantan Timur masih bertumpu pada sektor migas dan batubara, namun seiring dengan semakin berkurangnya potensi kedua produk tersebut hanya untuk beberapa tahun kedepan maka pemerintah harus berupaya untuk mencari produk alternatif sebagai pengganti. Sektor industri non migas secara nasional terus meningkat dan sejak tahun 1990 telah menjadi sektor paling dominan menggantikan sektor pertanian namun sektor ini masih terpusat di pulau Jawa dan mulai berangsur-

angsur mulai memasuki pulau Sulawesi, Sumatra dan Kalimantan.

Sektor Pertambangan, Penggalian dan sektor Industri Pengolahan merupakan sektor strategis dalam perekonomian Kalimantan Timur. Nilai tambah sektor Industri Pengolahan mengalami peningkatan yang signifikan dibanding sektor lainnya. Kondisi ini ditopang oleh perkembangan pada subsektor Industri Gas Alam Cair (LNG) dari sisi harga. Sehingga meskipun terjadi penurunan tingkat produksi, tapi karena adanya peningkatan harga yang cukup signifikan, maka terjadi kenaikan nilai tambah yang cukup besar.

Disamping itu juga tengah dikembangkan produk CPO, dimana Indonesia merupakan produsen dan eksportir CPO terbesar di dunia. Orientasi pasar industri CPO sebagian besar untuk ekspor namun bahan baku industri ini 100% diperoleh dari dalam negeri.

3. Peningkatan Efisiensi Sistem Distribusi Perdagangan, Daya Saing Komoditi dan Ekspor Non Migas dan Non Batubara

Sektor perdagangan dapat memberikan daya dorong dan nilai tambah bagi perekonomian nasional yang merupakan salah satu pilar strategis bagi kesinambungan kinerja ekonomi dan kedaulatan ekonomi nasional. Meningkatkan daya saing perdagangan secara efisien dilakukan dengan menyederhanakan sistem perdagangan dalam negeri maupun perdagangan luar negeri, memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri lebih diutamakan. Khususnya perdagangan Kalimantan Timur dimana kebutuhan dasar ekonomi masyarakat lebih banyak didatangkan dari luar provinsi dan konektivitas antar wilayah dalam provinsi juga masih menjadi kendala.

4. Peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen.

Masalah Utama Konsumen saat ini adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah. Rendahnya

kesadaran konsumen tentang haknya berpotensi mengurangi kemampuan konsumen dalam melindungi dirinya dari pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Konsumen semakin perlu diberdayakan untuk membuat keputusan yang optimal, memahami preferensinya masing - masing dan pilihan - pilihan yang tersedia, mengetahui hak - haknya, mengerti kapan haknya di langgar serta mengajukan komplain dan meminta ganti rugi apabila diperlukan.

Keberdayaan konsumen dapat diwujudkan melalui 2 cara yaitu perlindungan konsumen dan pendidikan konsumen.

Menurut undang - undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yang dimaksud dengan Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Sementara itu pendidikan konsumen segala upaya yang bertujuan membekali konsumen dengan informasi dan keterampilan untuk membekali tantang di pasar serta meningkatkan niatnya dengan pemasar, sehingga dapat meningkatnya kesejahteraannya.

Untuk mewujudkan perlindungan konsumen yang bersifat preventif, maka pemerintah perlu menumbuhkan keberdayaan konsumen. Indikator yang menggambarkan terwujudnya kondisi keberdayaan konsumen (IKK).

Indeks Keberdayaan Konsumen merupakan indeks yang mengukur kesadaran, pemahaman dan kemampuan menerapkan hak dan kewajibannya konsumen dalam berinteraksi dengan pasar. Nilai Indeks Keberdayaan Konsumen ini dinilai dapat dijadikan dasar untuk membentuk kebijakan perlindungan konsumen 5 (lima) Tahun kedepan (2019 - 2023) guna meningkatkan keberdayaan konsumen melalui berbagai upaya edukasi kepada konsumen sebagai langkah preventif terhadap exses negatif.

Tabel 3.3 Target Indikator Utama Tahun 2023

TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN	TARGET TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Target Sasaran Tahun 2023
1	Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Non Migas dan Batubara	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan non Migas dan Batubara terhadap PDRB	9,86%	1 Peningkatan Kontribusi lapangan industri pengolahan non Migas dan batubara	Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan non migas dan non batubara terhadap PDRB	4,15 %
2	Meningkatnya Nilai Ekspor Non Migas dan non Batubara	Nilai Ekspor Komoditas Non Migas dan Non Batubara	1.89 Milyar US\$	2 Peningkatan efisiensi Sistem Distribusi Perdagangan, daya saing Komoditi dan ekspor non migas dan non Batubara	Presentase Ekspor non migas dan non batubara terhadap total ekspor kaltim	18.97%
					Disparitas harga antar wilayah	17%
				3 Peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen	Meningkatnya Indeks Keberdayaan Konsumen (nilai)	54
3	Meningkatnya usaha ekonomi koperasi dan UKM	Kontribusi Koperasi dan UKM terhadap PDRB	13,50%	4 Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	Nilai Omset Koperasi	1,11 Triliun
					Nilai Omset UKM	54 Triliun

### 3.3. Program dan Kegiatan

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah . Dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 ada 19 program dan 38 kegiatan . Untuk lokasi kegiatan hampir di semua wilayah Provinsi Kalimantan Timur Kebutuhan dana APBD Rp. 50,000,000,000,- Jika rumusan program dan kegiatan yang dirinci tidak sesuai dengan Rancangan AkhirRK maka akan berdampak pada capaian kinerja baik program maupun kegiatan. Dan diharapkan kebutuhan anggaran yang ada di rumusan rencana kerja dapat sesuai dengan yang diharapkan untuk mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah. Dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 ini dibuat untuk mencapai tujuan dan sasaran maka dibuat beberapa program yang akan dilaksanakan pada tahun 2023, yaitu :

Tabel 3.4 Program, Kegiatan dan SubKegiatan

No	PROGRAM	KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
				5	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
				6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
				7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
		3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
				9	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
		4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor

No	PROGRAM	KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
				12	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
				13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
		5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				15	Pengadaan Mebel
				16	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				17	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
				19	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				20	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
				22	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	8	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	23	Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel
3	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	9	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	24	Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi
4	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	10	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	25	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	11	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	26	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	12	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	27	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan
7	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	13	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	28	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi
8	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	14	Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar	29	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya

No	PROGRAM	KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
		15	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	30	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA
9	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	16	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	31	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor
		17	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	32	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota
				33	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
10	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	18	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	34	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan
				35	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor
11	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	19	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	36	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen
				37	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen
		20	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	38	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen
12	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	21	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	39	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi
13	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	22	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	40	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri
				41	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
				42	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
				43	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri

No	PROGRAM	KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
14	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	23	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	44	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
				45	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi
15	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	24	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	46	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
				47	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas
				48	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas
	Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.2.17.01.000 2 UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang				
16	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	25	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	49	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
		26	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
		27	Administrasi Umum Perangkat Daerah	51	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
				52	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				53	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				54	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
				55	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
		28	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	56	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		29	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	57	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
				58	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				59	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		30	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan



No	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN
			61 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			62 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			63 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
17	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	31 Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	64 Verifikasi Mutu Produk
			65 Pengembangan Layanan Pengujian
			66 Pengembangan Layanan Sertifikasi
			67 Pengembangan Layanan Kalibrasi
	Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.2.17.01.000 3 UPTD Pelatihan Koperasi		
18	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	32 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	68 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
		33 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	69 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
		34 Administrasi Umum Perangkat Daerah	70 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
			71 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			72 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
			73 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
		35 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	74 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		36 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
			76 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		37 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	77 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
			78 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			79 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			80 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
19	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	38 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	81 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi

Tabel 3.5 Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 tertuang dalam prioritas Pembangunan Tahun 2023.

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	TUJUAN/SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR PROGRAM PRIORITAS	TARGET PROGRAM 2023	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET SUB KEGIATAN	URAIAN PENJELASAN RENCANA PELAKSANAAN SUB KEGIATAN DI TAHUN 2023 (OUTPUT DLL)	LOKUS PELAKSANAAN SUB KEGIATAN (MINIMAL KAB/KOTA)	PAGU INDIKATIF
<b>PP 2 : Penguatan ekonomi kerakyatan dan kewirausahaan masyarakat</b>	<b>Tujuan 3 : Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas</b>												
	Sasaran 12 : Meningkatnya usaha ekonomi koperasi dan UKM	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase tercapainya target UKM naik kelas (%)	1	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan, Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Wira usaha pemula (Wirausaha Pemula)	10	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan (Unit Usaha)	200	- HARI UMKM NASIONAL - Pameran / EXPO	10 Kab/Kota	450.000.000
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase tercapainya target Koperasi sehat (%)	10	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang dilakukan pengawasan (Koperasi)	100	Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	Jumlah Koperasi Yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan dan Tersedianya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel (Unit Usaha)	20		10 Kab/Kota	600.000.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase pertumbuhan UKM yang menggunakan	3	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi	Jumlah wira usaha mandiri	1	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan	50	- Pendampingan Pengembangan UKM	10 Kab/Kota	500.000.000

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	TUJUAN/SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR PROGRAM PRIORITAS	TARGET PROGRAM 2023	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET SUB KEGIATAN	URAIAN PENJELASAN RENCANA PELAKSANAAN SUB KEGIATAN DI TAHUN 2023 (OUTPUT DLL)	LOKUS PELAKSANAAN SUB KEGIATAN (MINIMAL KAB/KOTA)	PAGU INDIKATIF
			platform pasar berbasis digital (%)		Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	(Wirusaha Mandiri)		Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi (Unit Usaha)				
<b>PP 3 : Peningkatan produktivitas kawasan industri pengolahan</b>	Sasaran 9 : Meningkatnya kontribusi Sektor industri pengolahan Non Migas dan Batubara	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara di kawasan peruntukan industri (industri)	2	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah pelaksanaan rencana pembangunan industri provinsi (Dokumen)	1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri (Dokumen)	3	kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi percepatan pembentukan pembangunan pengembangan dan pengelolaan kawasan Industri dan sentra industri kecil dan menengah dengan ouput nya terlaksanaanya fasilitasi pembentukan pembangunan pengembangan dan pengelolan kawasan industri dan sentra industri kecil menengah	10 Kab/Kota	240.000.000
								Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen)	1	kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kompetensi sumber daya manusia industri dengan	10 Kab/Kota	115.000.000

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	TUJUAN/SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR PROGRAM PRIORITAS	TARGET PROGRAM 2023	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET SUB KEGIATAN	URAIAN PENJELASAN RENCANA PELAKSANAAN SUB KEGIATAN DI TAHUN 2023 (OUTPUT DLL)	LOKUS PELAKSANAAN SUB KEGIATAN (MINIMAL KAB/KOTA)	PAGU INDIKATIF
											output data kebutuhan kompetensi tenaga kerja industri dan calon tenaga kerja industri yang dibutuhkan DuDI		
								Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	5	Kegiatan ini dilaksanakan sebagai usaha pelestarian nilai budaya bangsa yang tercermin dalam produk kerajinan dengan output terlaksananya Rakernas Rakerda Pelatihan dan pameran ditetapkannya pemenang dekranasda award dan panju keberhasilan	10 Kab/Kota	1.500.000.000
								Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan Industri (Dokumen)	1	kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka untuk mengetahui hasil capaian dari sasaran dan pelaksanaan program-program pembangunan sektor industri di provinsi dengan	10 Kab/Kota	140.000.000

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	TUJUAN/SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR PROGRAM PRIORITAS	TARGET PROGRAM 2023	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET SUB KEGIATAN	URAIAN PENJELASAN RENCANA PELAKSANAAN SUB KEGIATAN DI TAHUN 2023 (OUTPUT DLL)	LOKUS PELAKSANAAN SUB KEGIATAN (MINIMAL KAB/KOTA)	PAGU INDIKATIF
											output data realisasi capaian pembangunan industri		
<b>PP 4 : Penguatan ekspor komoditi unggulan yang memiliki nilai tambah tinggi</b>	Sasaran 8 : Meningkatnya Nilai Ekspor Non Migas dan Batubara	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase pertumbuhan nilai ekspor non migas dan non batubara (%)	5	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah Calon Ekspertir dan Ekspertir yang Mendapatkan Akses Pasar Ekspo (orang)	4	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan (Pelaku Usaha)	6	Pelaksanaan Dilakukan 1. Trade Expo : 2 pelaku usaha 2. Bisnis Machting : 4 pelaku usaha	10 Kab/Kota dan luar daerah	500.000.000
								Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina (Pelaku Usaha)	50	pelaksanaan yang di lakukan : 1. exportir baru yang teregister dengan SKA : 10 Pelaku usaha 2. Bimtek/Sosialisasi/ Sinkronisasi : 30 pelaku usaha 3. Pendampingan	10 Kab/Kota dan luar daerah	350.000.000

<b>PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>TUJUAN/SASARAN</b>	<b>PROGRAM PRIORITAS</b>	<b>INDIKATOR PROGRAM PRIORITAS</b>	<b>TARGET PROGRAM 2023</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KEGIATAN</b>	<b>TARGET KEGIATAN</b>	<b>SUB KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR SUB KEGIATAN</b>	<b>TARGET SUB KEGIATAN</b>	<b>URAIAN PENJELASAN RENCANA PELAKSANAAN SUB KEGIATAN DI TAHUN 2023 (OUTPUT DLL)</b>	<b>LOKUS PELAKSANAAN SUB KEGIATAN (MINIMAL KAB/KOTA)</b>	<b>PAGU INDIKATIF</b>
											pelaku usaha : 10 pelaku usaha		



## **BAB IV**

### **Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah**

Rencana Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah berisikan Program dan Kegiatan prioritas RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023 beserta Pendanaannya yang mengimplementasikan visi dan misi Gubernur yang tertuang dalam RPJMD tahun 2019 -2023 . strategi tahun ini diterapkan dengan harapan agar pembangunan di provinsi Kalimantan Timur dalam tema RKPD tahun 2023 “Penguatan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan menuju Kesejahteraan Masyarakat dalam kerangka Kalimantan Timur Berdaulat.” sesuai dengan peruntukannya, dirancang berdasar perencanaan pada masing-masing bidang atau sektor dalam Perangkat Daerah (PD) provinsi maupun kabupaten/kota. Berbagai bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan ini akan dijabarkan dalam indikator kinerja program sehingga dapat dilihat penentuan target capaian kinerja program beserta kerangka pendanaan yang dibutuhkan. Poin terpenting yang harus diperhatikan dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas adalah kemampuan pendanaan (pagu indikatif) Provinsi Kalimantan Timur. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis PD, termasuk penjabaran kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya ,berikut Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2024 :



Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2024

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana )				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
			<b>Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan UPTD</b>			<b>48,739,761,000</b>		<b>50,350,000,000</b>			
<b>2</b>			<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>								
<b>2</b>	<b>1</b> <b>7</b>		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>			<b>33,815,598,750</b>		<b>35,043,431,855</b>			
<b>2</b>	<b>1</b> <b>7</b>	<b>1</b>		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	90 %	<b>31,565,598,750</b>	90 %	<b>30,443,431,855</b>		
<b>2</b>	<b>1</b> <b>7</b>	<b>1</b>	<b>1</b> <b>0</b> <b>1</b>	<b>Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	79 nilai	<b>1,408,585,000</b>	73 nilai	<b>1,108,585,000</b>		
<b>2</b>	<b>1</b> <b>7</b>	<b>1</b>	<b>1</b> <b>0</b> <b>1</b>	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Dokumen	718,985,000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	6 Dokumen	550,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana )				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
2	1	7	1	1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Dokumen	689,600,000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Dokumen	558,585,000
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	persentase Laporan yang disusun sesuai Ketentuan		100 %	<b>20,592,501,279</b>		100 %	<b>19,753,171,619</b>
2	1	7	1	1	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Samarinda , Sungai Kunjang, Karang Anyar	76 orang/ bulan	14,948,802,995	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	80 orang/ bulan	15,119,766,635
2	1	7	1	1	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Samarinda , Sungai Kunjang, Karang Anyar	25 Dokumen	5,604,058,784	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	25 Dokumen	4,593,404,984

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana )				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	1	1	1	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Samarinda , Samarinda Ulu, Air Putih	2 Laporan	10,000,000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Laporan	10,000,000
2	1	1	1	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Kota Samarinda , Sungai Kunjang, Karang Anyar	3 Dokumen	9,930,000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Dokume n	10,000,000
2	1	1	1	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semester n SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	Kota Samarinda , Sungai Kunjang, Karang Anyar	14 Laporan	19,709,500	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	14 Lapora n	20,000,000
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Jumlah PNS Yang Mengikuti Pelatihan/Bimtek		60 orang	<b>1,212,200,000</b>		60 orang	<b>650,000,000</b>
2	1	1	1	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kota Samarinda , Samarinda	200 Paket	212,500,000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 paket	250,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana )				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
							Ulu, Air Putih						
2	1	7	1	1 0 5	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 orang	999,700,000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	30 orang	400,000,000
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>1</b> <b>0</b> <b>6</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah Bulan Administrasi Umum Perangkat Daerah		12 bulan	<b>674,937,000</b>		12 bulan	<b>568,000,000</b>
2	1	7	1	1 0 6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda , Sungai Kunjang, Karang Anyar	3 paket	106,864,000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 paket	90,000,000
2	1	7	1	1 0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8000 paket	390,083,000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	8000 pake t	300,000,000
2	1	7	1	1 0 6	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Samarinda , Sungai Kunjang, Karang Anyar	2 paket	150,000,000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 paket	150,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana )				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	1	1	1	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Samarinda , Sungai Kunjang, Karang Anyar	1920 Doku men	27,990,000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	1920 Dok umen	28,000,000
2	1	1	1	7	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Disperindagkop		25 unit	<b>4,024,099,000</b>		25 unit	<b>5,753,675,236</b>
2	1	1	1	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kota Samarinda , Sungai Kunjang, Karang Anyar	2 unit	494,410,000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 unit	20,000,000
2	1	1	1	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Samarinda , Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	1 paket	2,988,670,000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 paket	1,000,000,000
2	1	1	1	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Samarinda , Sungai Kunjang, Semua Kelurahan	1 unit	535,937,000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 unit	200,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana )				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	1	1	1	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian	2 unit	5,082,000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 unit	4,533,675,236
2	1	1	1	8	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Disperindagkop		12 bulan	<b>2,146,680,576</b>		12 bulan	<b>1,910,000,000</b>
2	1	1	1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Samarinda , Sungai Kunjang, Karang Anyar	12 laporan	10,000,000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 laporan	10,000,000
2	1	1	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Samarinda , Sungai Kunjang, Karang Anyar	36 Laporan	814,134,576	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	36 Laporan	800,000,000
2	1	1	1	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda , Sungai Kunjang, Karang Anyar	12 laporan	1,322,546,000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 laporan	1,100,000,000
2	1	1	1	9	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	jumlah bulan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Disperindagkop		12 bulan	<b>1,506,595,895</b>		12 bulan	<b>700,000,000</b>

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana )				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
2	1	7	1	1 0 9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kota Samarinda , Sungai Kunjang, Karang Anyar	35 unit	546,589,000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	35 unit	400,000,000
2	1	7	1	1 0 9	1 0	Pemeliharaan/Rehabili tasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Samarinda , Sungai Kunjang, Karang Anyar	20 unit	960,006,895	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	20 unit	300,000,000
2	1	7	3			<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>	Persentase tercapainya target Koperasi sehat		10 %	<b>583,040,000</b>		10 %	<b>600,000,000</b>
2	1	7	3	1 0 1		<b>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	jumlah Koperasi yang dilakukan pengawasan		30 Koperasi	<b>583,040,000</b>		30 Kopera si	<b>600,000,000</b>

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana )				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	1	3	1	2	Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	Jumlah Koperasi Yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan dan Tersedianya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 unit usaha	583,040,000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	20 unit usaha	600,000,000
2	1	5			<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>	jumlah Koperasi dan UKM yang Terlatih (DAK)		520 Koperasi dan UKM	<b>1,000,000</b>		520 Koperasi dan UKM	<b>2,400,000,000</b>
2	1	5	1		<b>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	jumlah peserta Pelatihan Koperasi dan UKM (DAK)		300 orang	<b>1,000,000</b>		500 orang	<b>2,400,000,000</b>
2	1	5	1	1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (DAK)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	300 orang	1,000,000	DAK Non Fisik-PK2UKM	500 orang	2,400,000,000



Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana )				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
2	1	6		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>	Jumlah Koperasi berkualitas		10 Koperasi	<b>874,660,000</b>		10 Kopera si	<b>650,000,000</b>	
2	1	6	1 0 1	<b>Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	jumlah Koperasi yang Melakukan RAT		25 koperasi	<b>874,660,000</b>		25 kopera si	<b>650,000,000</b>	
2	1	6	1 0 1	2	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	JJumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Semua Kab/Kota, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	150 unit usaha	874,660,000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	150 unit usaha	650,000,000
2	1	7		<b>PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>	Persentase tercapainya target UKM naik kelas		1 %	<b>463,700,000</b>		1 %	<b>450,000,000</b>	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana )				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
						Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	1	7	1 0 1	<b>Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan</b>	Jumlah Wira Usaha Pemula		10 Wirausaha Pemula	<b>463,700,000</b>		10 Wirausaha Pemula	<b>450,000,000</b>
2	1	7	1 0 1	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200 unit usaha	463,700,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	200 unit usaha	450,000,000
2	1	8		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>	Persentase pertumbuhan UKM yang menggunakan platform pasar berbasis digital		3 %	<b>327,600,000</b>		3 %	<b>500,000,000</b>

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana )				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
2	1	8	1 . 0 1		<b>Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah</b>	Jumlah wira usaha mandiri		1 wirausaha	<b>327,600,000</b>		1 wirausaha	<b>500,000,000</b>
2	1	8	1 . 0 1	1	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 unit usaha	327,600,000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	50 unit usaha	500,000,000
3					<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>							
3	3	0			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>				<b>4,650,000,000</b>			<b>4,650,000,000</b>
3	3	0	2		<b>PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN</b>	Jumlah Eksportir yang aktif menggunakan SKA		260 Ekspor tir	<b>208,820,000</b>		260 Ekspo rtir	<b>200,000,000</b>
3	3	0	2	1 . 0 4	<b>Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)</b>	jumlah SKA yang diterbitkan		4000 lemb ar	<b>208,820,000</b>		4000 lemb ar	<b>200,000,000</b>

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana )				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3	3	2	1	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3500 Dokumen	208,820,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3500 Dokumen	200,000,000
3	3	4			<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING</b>	Persentase stabilitas harga bapokting		80 %	<b>968,489,000</b>		80 %	<b>1,050,000,000</b>
3	3	4	1		<b>Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi</b>	Laporan Ketersediaan Bapokting		12 bulan	<b>345,382,000</b>		12 bulan	<b>400,000,000</b>
3	3	4	1	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 kegiatan	345,382,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6 kegiatan	400,000,000

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana )				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
						Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3	3	4	1 0 2	<b>Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan</b>	Jumlah Komoditi Bapokting yang Dipantau		21 jenis komoditi	<b>623,107,000</b>		21 jenis komoditi	<b>650,000,000</b>
3	3	4	1 0 2	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	12 Laporan	538,182,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	12 Lapora n	500,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana )				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
3	3	0	4	1 · 0 2	2	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Laporan	84,925,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	10 Laporan	150,000,000
3	3	0	5			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>	Persentase pertumbuhan nilai ekspor non migas dan non batubara		5 %	<b>792,800,000</b>		5 %	<b>850,000,000</b>
3	3	0	5	1 · 0 1		<b>Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi</b>	Jumlah Calon Ekspertir dan Ekspertir yang Mendapatkan Akses Pasar Ekspor (orang)		2 orang	<b>792,800,000</b>		2 orang	<b>850,000,000</b>

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana )				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3	3	5	1 0 1	3	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	2 Pelaku Usaha	421,610,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	2 Pelaku Usaha	500,000,000
3	3	5	1 0 1	5	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	Semua Kab/Kota, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	2 pelaku usaha	371,190,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	2 pelaku usaha	350,000,000
3	3	6			<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	Persentase peningkatan pengawasan barang beredar dan/atau jasa SNI wajib yang diawasi		15 %	<b>2,000,000,000</b>		15 %	<b>2,000,000,000</b>
3	3	6	1 0 1		<b>Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota</b>	konsumen yang telah diberikan edukasi		1000 Konsu men	<b>1,462,000,000</b>		1000 oran g	<b>1,500,000,000</b>
3	3	6	1 0 1	1	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	Semua Kab/Kota, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	3 BPSK	780,000,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	3 BPSK	800,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana )				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3	3	6	1 0 1	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Pengaduan	682,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	20 Pengaduan	700,000,000
3	3	6	1 0 3		<b>Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota</b>	jumlah barang dan jasa yang sesuai Ketentuan		27 jenis	<b>538,000,000</b>		27 jenis	<b>500,000,000</b>
3	3	6	1 0 3	1	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Laporan	538,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Laporan	500,000,000
3	3	7			<b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>	Peningkatan Jumlah Produk Dalam Negeri Yang difasilitasi pemasaran		5 Produk	<b>679,891,000</b>		5 Produk	<b>550,000,000</b>
3	3	7	1 0 2		<b>Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri</b>	Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi Pemasaran		10 pelaku usaha	<b>679,891,000</b>		10 pelaku usaha	<b>550,000,000</b>



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana )				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
3	3	0	7	1 0 2	1	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14 UMKM	679,891,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	14 UMKM	550,000,000
3	3	1				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>				<b>3,185,000,000</b>		<b>3,185,000,000</b>	
3	3	1	2			<b>PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	Jumlah Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara di kawasan peruntukan industri		2 Industri	<b>1,983,000,000</b>		2 Industri	<b>1,995,000,000</b>
3	3	1	2	1 0 1		<b>Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi</b>	Jumlah pelaksanaan rencana pembangunan industri provinsi		5 Dokumen	<b>1,983,000,000</b>		5 Dokumen	<b>1,995,000,000</b>
3	3	1	2	1 0 1	2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Dokumen	316,402,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Dokumen	240,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana )				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3	3	2	1	3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Semua Kab/Kota, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	1 Dokumen	112,890,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokume n	115,000,000
3	3	2	1	5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	5 Dokumen	1,417,294,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	5 Dokume n	1,500,000,000
3	3	2	1	6	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Semua Kab/Kota, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	1 Dokumen	136,414,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokume n	140,000,000
<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>			<b>PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI</b>	Persentase pengendalian izin usaha sektor industri terhadap jumlah industri yang terdata		5 %	<b>721,000,000</b>		5 %	<b>700,000,000</b>

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana )				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
3	3	1	3	1 . 0 1	<b>Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi</b>	Jumlah industri yang dilakukan pemantauan dan pengawasan dalam penerbitan perizinan		22 industri	<b>721,000,000</b>		22 industri	<b>700,000,000</b>
3	3	1	3	1 . 0 1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam Rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah- Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 Dokumen	250,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7 Dokumen	250,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana )				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3	3	3	1	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan Di Bidang Industri dalam Lingkup perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Dokumen	471,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	10 Dokumen	450,000,000
3	3	4			<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>	Jumlah industri daerah yang dapat dipantau perkembangannya		10 Industri	<b>481,000,000</b>		10 Industri	<b>490,000,000</b>
3	3	4	1		<b>Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)</b>	jumlah industri yang memiliki IUI, IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan provinsi		10 industri	<b>481,000,000</b>		10 industri	<b>490,000,000</b>
3	3	4	1	1	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Dokumen	117,008,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Dokumen	120,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana )				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3	3	4	1	2	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	97,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	100,000,000
3	3	4	1	3	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Dokumen	266,992,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Dokumen	270,000,000
<b>3</b>					<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>							
<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>				<b>4,035,264,308</b>			<b>4,417,668,145</b>
3	3	1			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM		90 %	<b>2,606,248,308</b>		90 %	<b>2,888,000,000</b>
3	3	1	1	2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	persentase laporan yang disusun sesuai ketentuan		100 %	<b>1,394,337,248</b>		100 %	<b>1,400,000,000</b>

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana )				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
3	3	0	1	1 0 2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Samarinda , Sungai Kunjang, Karang Anyar	183 Dokum en	1,394,337,248	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	183 Doku men	1,400,000,000
<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b> <b>0</b> <b>5</b>		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Jumlah PNS yang Mengikuti Pelatihan/Bimtek		60 Orang	<b>100,800,000</b>		10 Orang	<b>100,000,000</b>
3	3	0	1	1 0 5	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	10 orang	100,800,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	10 orang	100,000,000
<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b> <b>0</b> <b>6</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah Bulan Administrasi Umum Perangkat Daerah		12 bulan	<b>148,172,440</b>		12 bulan	<b>227,000,000</b>
3	3	0	1	1 0 6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda , Sungai Kunjang, Karang Anyar	1 paket	10,290,810	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	1 paket	12,000,000
3	3	0	1	1 0 6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda , Sungai Kunjang, Karang Anyar	20 paket	68,856,630	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	20 paket	100,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana )				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
3	3	0	1	1 0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda , Sungai Kunjang, Karang Anyar	1500 paket	20,160,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1500 paket	45,000,000
3	3	0	1	1 0 6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Samarinda , Sungai Kunjang, Karang Anyar	30 paket	45,025,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	30 paket	46,000,000
3	3	0	1	1 0 6	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Samarinda , Sungai Kunjang, Karang Anyar	5 Dokumen	3,840,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Dokumen	24,000,000
<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b> <b>0</b> <b>7</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Disperindagkop		25 unit	<b>138,946,380</b>		25 unit	<b>300,000,000</b>
3	3	0	1	1 0 7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Samarinda , Sungai Kunjang, Karang Anyar	1 paket	138,946,380	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 paket	300,000,000
<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b> <b>0</b> <b>8</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Disperindagkop		12 bulan	<b>460,539,800</b>		12 bulan	<b>510,000,000</b>

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana )				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
							Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
3	3	0	1	1	08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Samarinda , Sungai Kunjang, Karang Anyar	50 Laporan	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	50 Laporan	10,000,000
3	3	0	1	1	08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Samarinda , Sungai Kunjang, Karang Anyar	36 Laporan	150,558,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	36 Laporan	150,000,000
3	3	0	1	1	08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	299,981,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	350,000,000
<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	jumlah bulan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Disperindagkop		12 bulan	<b>363,452,440</b>		12 bulan	<b>351,000,000</b>
3	3	0	1	1	09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Samarinda , Sungai Kunjang, Karang Anyar	5 unit	80,249,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 unit	76,000,000



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana )				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3	3	1	1	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Samarinda , Sungai Kunjang, Karang Anyar	10 unit	126,870,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	10 unit	25,000,000
3	3	1	1	10	Pemeliharaan/Rehabili tasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Samarinda , Sungai Kunjang, Karang Anyar	4 unit	156,333,440	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	4 unit	250,000,000
3	3	6			<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	Persentase capaian target sertifikat mutu barang		100 %	<b>1,429,016,000</b>		100 %	<b>1,529,668,145</b>
3	3	6	1		<b>Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota</b>	persentase pelaksanaan pengujian dan sertifikasi mutu produk		100 %	<b>1,429,016,000</b>		100 %	<b>1,529,668,145</b>
3	3	6	1	1	Verifikasi Mutu Produk	Jumlah Komoditi Potensial yang Dipantau	Semua Kab/Kota, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	3 komoditi	297,624,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	3 komoditi	400,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana )				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
3	3	6	1	2	Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah Dokumen Hasil Pengujian Mutu Barang	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60 Dokumen	259,884,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	60 Dokumen	450,000,000	
3	3	6	1	3	Pengembangan Layanan Sertifikasi	Jumlah Sertifikat Produk yang Diterbitkan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Sertifikat	271,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Sertifikat	400,000,000	
3	3	6	1	4	Pengembangan Layanan Kalibrasi	Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2215 Sertifikat	600,508,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2215 Sertifikat	279,668,145	
2					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>								
2	1				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>				<b>3,053,897,942</b>				<b>3,053,900,000</b>
2	1	1			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM		90 %	<b>2,553,061,942</b>		90 %	<b>2,453,900,000</b>	
2	1	1	1		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	persentase laporan yang disusun sesuai ketentuan		100 %	<b>1,409,397,792</b>		100 %	<b>1,420,000,000</b>	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana )				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
2	1	7	1	1 · 0 2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Samarinda , Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	12 Dokume n	1,409,397,792	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	12 Dokum en	1,420,000,000
2	1	7	1	1 · 0 5		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Jumlah PNS/NONPNS Yang Mengikuti Pelatihan/Bimtek		25 orang	<b>59,804,000</b>		25 orang	<b>50,000,000</b>
2	1	7	1	1 · 0 5	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Samarinda , Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	7 Orang	59,804,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	7 Orang	50,000,000
2	1	7	1	1 · 0 6		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah		12 bulan	<b>131,305,750</b>		12 bulan	<b>100,900,000</b>
2	1	7	1	1 · 0 6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda , Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	12 paket	21,510,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	12 paket	21,000,000
2	1	7	1	1 · 0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda , Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	7 paket	67,955,750	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	7 paket	38,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana )				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
2	1	7	1	1 0 6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Samarinda , Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	4 paket	38,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 paket	38,000,000
2	1	7	1	1 0 6	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Samarinda , Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	24 Dokumen	3,840,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	24 Dokumen	3,900,000
2	1	7	1	1 0 7		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Disperindagkop		25 unit	<b>99,375,000</b>		25 unit	<b>81,000,000</b>
2	1	7	1	1 0 7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Samarinda , Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	21 unit	99,375,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	21 unit	81,000,000
2	1	7	1	1 0 8		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Disperindagkop		12 bulan	<b>194,990,800</b>		12 bulan	<b>195,000,000</b>
2	1	7	1	1 0 8	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Samarinda , Sungai Pinang, Sungai	400 Laporan	4,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	400 Laporan	4,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana )				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
							Pinang Dalam					
2	1	1	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Samarinda , Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	12 Laporan	190,990,800		12 Lapora n	191,000,000
2	1	1	1		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Disperindagkop		12 bulan	<b>658,188,600</b>		12 bulan	<b>607,000,000</b>
2	1	1	1	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Samarinda , Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	3 unit	71,006,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	3 unit	71,000,000
2	1	1	1	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Samarinda , Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	80 unit	85,705,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	80 unit	76,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana )				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
2	1	7	1	1 · 0 9	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Kota Samarinda , Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	2 unit	501,477,600	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	2 unit	460,000,000
2	1	7	5			<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>	Jumlah Koperasi dan UKM yang Terlatih		300 Kopera si dan UKM	<b>500,836,000</b>		300 Koper asi dan UKM	<b>600,000,000</b>
2	1	7	5	1 · 0 1		<b>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	jumlah Koperasi dan UKM yang Mengikuti Pelatihan		300 Kopera si dan UKM	<b>500,836,000</b>		300 Koper asi dan UKM	<b>600,000,000</b>
2	1	7	5	1 · 0 1	1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Kota Samarinda , Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	240 orang	500,836,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	240 orang	600,000,000
<b>TOTAL</b>										<b>48,739,761,00 0</b>			<b>50,350,000,000</b>

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Renja Atau Rencana Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2023 merupakan pelaksanaan tahun keempat Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2019-2023 berdasarkan acuan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 merupakan pelaksanaan tahun ke empat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023. Tema Pembangunan RKPD tahun 2023 adalah “Penguatan Daya Saing Daerah Dalam Rangka Menyambut IKN”. Tema ini mengandung substansi pokok pembangunan tahun 2023 yaitu menguatkan daya saing daerah seperti SDM, infrastruktur, ekonomi, reformasi birokrasi yang berbasis IT. Penyusunan Renja tahun 2023, dilakukan melalui berbagai tahapan dan dibahas dalam forum koordinasi dan konsultasi, baik antar Dinas Perindagkop kab/kota, Perangkat Daerah, lembaga pemerintah non kementerian dan pemangku kepentingan lainnya, serta memperhatikan hasil evaluasi tahun sebelumnya. Keberhasilan pencapaian target-target kinerja yang telah ditetapkan dalam

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023, tergantung pada kesesuaian asumsi-asumsi yang dibangun pada saat penyusunan Renja tahun 2023 ini. Salah satu asumsi yang digunakan dalam proses penyusunan Renja tahun 2023 ini adalah adanya kerjasama semua pelaku pembangunan dalam memberikan kontribusi sesuai peran serta kemauan untuk turut mengawal dan mengendalikan pelaksanaan semua rencana program/kegiatan yang telah direncanakan.

#### **5.1 Kaidah Pelaksanaan Pelaksanaan Rencana Kerja**

Rencana Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan Tahun 2023 memerlukan langkah-langkah praktis dan strategis namun tetap

relevan dalam menunjang pencapaian target pembangunan daerah. Adapun beberapa kaidah pelaksanaan Renja 2023 yang harus diperhatikan oleh pemangku kepentingan dan subyek pelaksana pembangunan lainnya, antara lain:

1. Renja Tahun 2023 merupakan rencana kerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur yang memerlukan peran serta aktif seluruh Pemangku Kepentingan untuk berkontribusi sesuai perannya masing-masing;
2. Rencana Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023 dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi antar pelaku Industri Pelaku KUKM dan Pelaku usaha untuk menjamin efektivitas dan efisiensi pelaksanaan;
3. Renja tahun 2023 merupakan pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023 berdasarkan RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023;
4. Setiap Unit Bidang dan UPTD lingkup Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usahak Kecil dan Menengah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur wajib menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023 dengan mempedomani RENJA Tahun 2023 serta melakukan sinkronisasi, integrasi, dan sinergitas program/kegiatan terhadap kebijakan RKPD Provinsi Kalimantan Timur dan Renja K/L 2023.
5. Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan atas pelaksanaan program/kegiatan pembangunan yang tercantum dalam Renja Dinas Perindagkop & UKM tahun 2023 wajib dilaksanakan oleh seluruh Kepala Bidang dan Kepala UPTD beserta unit-unit dibawahnya dengan tujuan untuk: (1) memastikan tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan; (2) memastikan penggunaan sumber



daya yang efisien dan efektif, akuntabel dan partisipatif; serta (3) melakukan pelaporan atas perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang menjadi kewenangan kepada gubernur dan masyarakat umum, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku

## **5.2 Rencana tindak lanjut.**

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2023, selanjutnya Renja Tahun 2023 akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Samarinda, Juli 2022  
Kepala Dinas,

**MUHAMMAD SA'DUDDIN**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 196405191985031001